



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

#BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Pusat Analisis dan
Layanan Informasi

2022



**Komisi Yudisial
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450.
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454, www.komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2023
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas
NIP 19690318 199603 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	6
Bab I Pendahuluan	8
Bab II Perencanaan Kinerja Palinfo Tahun 2022	12
Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	19
Bab IV Penutup.....	88
Lampiran.....	89

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi	8
Gambar 3.2. Tampilan SIPLM yang Sudah Diperbarui	21
Gambar 3.3 Tampilan Salah Satu Fitur Aplikasi E-Performance	22
Gambar 3.4. Arsitektur Aplikasi yang tertuang dalam Cetak Biru TIK. 23	
Gambar 3.5. Rancangan Pengembangan Otentifikasi Terpusat/Single Sign On (SSO) pada Implementasi Enterprises Service Bus (ESB) ..	24
Gambar 3.6 Rancangan Tampilan Single Sign On (SSO) Pada Implementasi ESB	25
Gambar 3.7 Audit Summary Sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 Tahun 2022 Komisi Yudisial.....	27
Gambar 3.8 Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Bersama Tim SMKI Mendampingi Auditor Eksternal Saat Melakukan Audit di Disaster Recovery Center Komisi Yudisial.....	28
Gambar 3.9 Sampul Muka Laporan Hasil Kajian Metode Penafsiran dalam Putusan Sidang Pleno.....	36
Gambar 3.10 Isi Laporan Hasil Kajian Metode Penafsiran dalam Putusan Sidang Pleno	37
Gambar 3.11 Tampilan Aplikasi Karakterisasi Putusan	38
Gambar 3.12 Ruang Pelayanan Informasi Publik Komisi Yudisial	40
Gambar 3.13 Alur Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	43

Gambar 3.14 Pelaksanaan Konferensi Pers Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2022	51
Gambar 3.15. Media Gathering yang Diikuti Puluhan Media Massa di Citarik, Sukabumi Pada 1-3 Oktober 2022.....	52
Gambar 3.16 Rafting Bersama Dalam Rangkaian Media Gathering..	53
Gambar 3.17 Tampilan Situs Web KY dengan Berita yang Diterjemahkan ke Bahasa Inggris	59
Gambar 3.18 Edukasi publik di Bukittinggi, 9 Juli 2022	61
Gambar 3.19 Edukasi publik di Lampung, 25 Agustus 2022	61
Gambar 3.21 Sampul Muka Laporan Kegiatan Perpustakaan Komisi Yudisial Tahun 2022	73
Gambar 3.22 Grafik Sebaran Responden Survei Pengguna Layanan Pengelolaan TIK	75

Daftar Tabel

Tabel 1.1 SDM Pusat Analisis dan Layanan Informasi Berdasarkan Status Kepegawaian, Pendidikan, dan Jenis Kelamin	2
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2022.....	12
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal.....	13
Tabel 2.3 Target Kinerja Komisi Yudisial Berdasarkan Kerangka Kinerja Sasaran Strategis	13
Tabel 2.4 Rencana Kerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2022.....	14
Tabel 3.1 Perbandingan Target dengan Capaian Kinerja Palinfo Tahun 2021 dan 2022	17
Tabel 3.2 Daftar 15 Putusan yang Dijadikan Objek Karakterisasi Tahun 2022.....	33
Tabel 3.3 Rekapitulasi Laporan Pelayanan Informasi PPID KYRI 1 Januari – 31 Desember 2022.....	40
Tabel 3.4 Rekapitulasi Kegiatan Pengelolaan Media Massa Tahun 2022.....	44
Tabel 3.5 Konten Media Sosial Komisi Yudisial Tahun 2022.....	54
Tabel 3.7 Daftar Topik Pemberitaan tentang KY Tahun 2022	57
Tabel 3.8 Rekapitulasi Persentasi Kenaikan Pemahaman Peserta Edukasi Publik Penghubung Komisi Yudisial.....	63

Tabel 3.9 Pelaksanaan Dialog Interaktif Komisi Yudisial di RRI Pro 3 FM Tahun 2022.....	65
Tabel 3.10 Daftar Pelaksanaan Audiensi Komisi Yudisial Tahun 2022.....	66
Tabel 3.11 Hasil Penghitungan Kuesioner Survei Pengguna Layanan Pengelolaan TIK	76
Tabel 3.12 Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Kerja Sesuai Dengan Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	77
Tabel 3.13 Rincian Penggunaan Anggaran Palinfo Tahun 2022	82

Kata Pengantar

Segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) masih terus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi di tahun 2022 ini. Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Palinfo mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan, kelembagaan Komisi Yudisial, pengelolaan data dan layanan informasi, hubungan masyarakat, serta pembinaan jabatan fungsional Penata Kehakiman di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

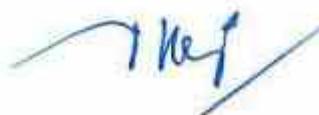
Pada tahun 2022, Palinfo melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) kelembagaan. Target kinerja sebagaimana yang dimuat dalam Renstra tersebut dilaksanakan oleh dua bidang yaitu: 1). Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman; dan 2). Bidang Data dan Layanan Informasi. Target kinerja Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman yaitu memberikan rekomendasi kebijakan praktis bagi pimpinan untuk menyikapi isu peradilan dan melakukan kajian untuk mendukung penguatan tugas dan fungsi kelembagaan Komisi Yudisial. Sementara itu, Bidang Data dan Layanan Informasi memiliki target kinerja sebagai berikut: pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terintegrasi; pemutakhiran data dan informasi; sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi; layanan informasi publik; monitoring media; edukasi publik; pengelolaan perpustakaan; dan penyusunan dan pencetakan bahan diseminasi publik di bidang yudisial.

Selain itu, Palinfo juga memiliki target kinerja berupa peningkatan layanan perkantoran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pencapaian target kinerja Palinfo sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2022, serta penyerapan anggarannya untuk pencapaian target tersebut.

Jakarta, 24 Januari 2023

**Kepala Pusat Analisis dan
Layanan Informasi,**



Juma'in

NIP. 196805151989121001

BAB I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk jangka waktu lima tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Sebagaimana amanat tersebut, Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) sesuai kewenangan, tugas pokok, dan fungsinya telah menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, serta program dan kegiatan untuk Periode 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Renstra Komisi Yudisial Periode 2020 s.d 2024. Palinfo diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan visi Komisi Yudisial yang tercantum dalam Renstra Komisi Yudisial Periode 2020 s.d 2024 yaitu "Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim".

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Palinfo mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan, kelembagaan Komisi Yudisial, pengelolaan data dan layanan informasi,

hubungan masyarakat, serta pembinaan jabatan fungsional Penata Kehakiman di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan tugasnya Palinfo menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan;
2. Penyusunan desain, penelaahan dan perumusan hasil dalam rangka penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial;
3. Perancangan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan aplikasi dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyediaan basis data;
4. Penyiapan bahan, pengolahan dan penyajian informasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan;
5. Pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
6. Penerjemahan lisan dan/atau tulisan;
7. Evaluasi dan penyusunan laporan; dan
8. Pelaksanaan ketatausahaan Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

2. Struktur Organisasi

Pusat Analisis dan Layanan Informasi terdiri atas:

1. Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
2. Bidang Data dan Layanan Informasi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi

Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, desain, penelaahan, dan perumusan hasil analisis dan kajian terhadap hakim, badan peradilan, kelembagaan Komisi Yudisial, pengelolaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan analisis, serta evaluasi dan penyusunan laporan serta pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

Sementara Bidang Data dan Layanan Informasi mempunyai tugas penyusunan rencana, kegiatan, perancangan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan aplikasi dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan basis data, penyiapan bahan, pengolahan dan penyajian informasi; pelaksanaan hubungan masyarakat; penerjemahan secara tertulis dan/atau lisan; pengelolaan perpustakaan; dan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengelolaan data dan layanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Palinfo didukung oleh sumber daya manusia dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1
SDM Pusat Analisis dan Layanan Informasi Berdasarkan Status Kepegawaian, Pendidikan, dan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Berdasarkan Status Kepegawaian			Berdasarkan Pendidikan			Berdasarkan Jenis Kelamin	
	CPNS	PNS	PPNPNS /Jasa Lainnya	D-III	S1	S2	L	P
Pusat Analisis dan Layanan Informasi	0	25	3	4	15	9	16	12

3. Isu Strategis

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Komisi Yudisial Periode 2020 s.d 2024. Isu strategis prioritas dari Palinfo pada tahun ini disesuaikan dengan Renstra Komisi Yudisial Periode 2020 s.d 2024 yaitu melakukan strategi perencanaan komunikasi publik, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dan meningkatkan reputasi lembaga. Namun, implementasi dari Isu strategis ini belum optimal karena Tim Komunikasi Krisis belum terbentuk sesuai dengan peta jalan yang telah disusun.

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2020 s.d 2024

Sejalan dengan Renstra Komisi Yudisial periode 2020 s.d 2024, Palinfo mengukuhkan peran dan fungsinya melalui visi sebagai berikut:

“Terwujudnya pemberdayaan stakeholder dan publik yang partisipatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Palinfo menjabarkannya ke dalam misi, sebagai berikut:

- A. Meningkatkan partisipasi stakeholder dan publik;
- B. Meningkatkan integrasi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif.

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Palinfo serta kontribusi pencapaian Palinfo pada Sasaran Program dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi	a) Pengembangan aplikasi yang terintegrasi	3 Aplikasi
		b) Persentase pemutakhiran data dan informasi	60%
2	Terkelolanya sistem manajemen keamanan TIK secara efektif	Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi	ISO 27001
3	Terlaksananya penelitian dan pengkajian	Rekomendasi penelitian dan pengkajian	3 rekomendasi
4	Meningkatnya efektivitas komunikasi publik melalui media maupun langsung	a. Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP)	Menuju Informatif
		b. Kategori publisitas positif media monitoring	Kategori positif
5	Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim	- Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi	15%
		- Laporan pengelolaan perpustakaan	1 laporan
		- Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial	45.000
6	Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Puas

C. Kontribusi dalam Pencapaian Sasaran Strategis Lembaga

Palinfo memiliki dua sasaran program untuk mendukung pencapaian sasaran program dan sasaran strategis lembaga. Sasaran program yang pertama yaitu terlaksananya pemberdayaan stakeholder dan publik. Indikator kinerja sasaran program tersebut adalah persentase kontribusi stakeholder Komisi Yudisial (KY) dan publik. Pada tahun 2022, target persentase kontribusi stakeholder KY dan publik adalah 60%. Sasaran program Palinfo yang kedua adalah terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif. Indikator kinerja sasaran program kedua ini adalah persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 85 % pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga memanfaatkan teknologi informasi. Kedua sasaran program Palinfo sebagaimana disebutkan di atas diharapkan dapat mendukung dua sasaran strategis lembaga.

Renstra Komisi Yudisial periode 2020 s.d 2024 mencantumkan dua sasaran strategis lembaga yaitu meningkatnya integritas hakim dan meningkatnya kapasitas manajemen internal. Untuk sasaran strategis pertama, meningkatnya integritas hakim, telah ditetapkan indikator kinerjanya yaitu indeks integritas hakim mencapai skor 7,36 pada tahun 2022. Adapun indikator kinerja untuk sasaran strategis lembaga yang kedua, meningkatnya kapasitas manajemen internal, terdiri atas dua hal. Pertama, nilai indeks reformasi birokrasi pada tahun 2022 ditargetkan mencapai kategori "A". Kedua, nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat "Baik" pada tahun 2022. Data mengenai sasaran program Palinfo untuk mendukung penetapan kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dan sasaran strategis Komisi Yudisial pada tahun 2022 disajikan dalam dua tabel di bawah ini:

- **Kontribusi Palinfo dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial**

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan (sumber data)
1	Terlaksananya pemberdayaan <i>stakeholder</i> dan publik	Persentase kontribusi <i>stakeholder</i> KY dan publik	60 %	Rekapitulasi jumlah <i>stakeholder</i> dan publik KY
2	Terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif	Persentase pemanfaatan teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang lembaga	85%	Rekapitulasi jumlah aplikasi yang dihasilkan

- **Target Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2022**

Tabel 2.3
Target Kinerja Komisi Yudisial Berdasarkan Kerangka Kinerja Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan (sumber data)
1	Meningkatnya integritas hakim	Indeks Integritas Hakim	7,36	Rekapitulasi hasil survey terbatas kepada hakim
2	Meningkatnya kapasitas manajemen internal	Nilai Indeks reformasi birokrasi	Kategori A	Surat Menpan terkait hasil evaluasi reformasi birokrasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan (sumber data)
		Nilai akuntabilitas kinerja lembaga	Predikat Baik	Surat Menpan terkait hasil nilai Sakip

D. Rencana Kerja Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Rencana kinerja juga merupakan suatu komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam waktu satu tahun. Rincian rencana kerja Palinfo tahun 2022 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2022

WA.3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik		11.634.920.000
3868.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	6.047.430.000
051	Pengelolaan infrastruktur TIK terintegrasi		1.805.113.000

052	Laporan hasil pemutakhiran data dan informasi		928.930.000
053	Pengelolaan sistem manajemen keamanan TIK		867.832.000
054	Pelaksanaan PPID		104.306.000
055	Media monitoring		305.231.000
056	Penyusunan bahan informasi publik		933.800.000
057	Pengelolaan perpustakaan		267.170.000
058	Edukasi publik		835.048.000
3868.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.033.700.000
002	Operasional dan pemeliharaan kantor		4.033.700.000
3868.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	15 Dokumen	180.000.000
051	Laporan dan evaluasi kinerja Palinfo		180.000.000
3868.FAI.001	Dokumen Hasil Kajian Kelembagaan	2 Lembaga	328.209.000
051	Pemetaan dan analisa isu/permasalahan		48.180.000
052A	Pelaksanaan kajian kelembagaan		120.736.000
052B	Pengelolaan administrasi fungsional Penata Kehakiman		125.785.000

052C	Pengangkatan fungsional Penata Kehakiman		28.375.000
053	Diseminasi hasil kajian		5.133.000
3868.FAI.002	Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi	15 Lembaga	437.399.000
051	Pengumpulan dan pemetaan putusan		49.350.000
052	Analisa dan anotasi putusan		69.805.000
053	Pengolahan dan finalisasi karakterisasi putusan		62.196.000
054	Diseminasi hasil karakterisasi putusan		256.048.000
3868.FAI.003	Analisis Putusan	3 Lembaga	608.182.000
051	Pengumpulan dan pemetaan putusan		13.952.000
052	Konsolidasi dan pelaksanaan analisis putusan		452.678.000
053	Diseminasi hasil analisis putusan		141.552.000

BAB III

Akuntabilitas Kinerja & Keuangan

A. CAPAIAN KINERJA

Kinerja Palinfo pada tahun 2022 telah mencapai target sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Perbandingan Target dengan Capaian Kinerja Palinfo
Tahun 2021 dan 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi	1. Pengembangan aplikasi yang terintegrasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%
		2. Persentase pemutakhiran data dan informasi	50%	50%	100%	60%	60%	100%
2	Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif	Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi	ISO 27001	ISO 27001	100%	ISO 27001	ISO 27001	100%
3	Terlaksananya penelitian dan pengkajian	Rekomendasi penelitian dan pengkajian	3 rekomen dasi	3 rekomen dasi	100%	3 rekomen dasi	3 rekomen dasi	100%
4	Meningkatnya efektifitas komunikasi publik melalui media maupun langsung	1. Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP)	Menuju informatif	informatif	106,13%	Menuju informatif	Menuju informatif	100%
		2. Kategori publisitas positif media monitoring	Kategori positif	positif	100%	Kategori positif	positif	100%
5	Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim	1. Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi	15%	17%	113,33 %	15%	16,68%	111,33%
		2. Laporan pengelolaan perpustakaan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

		3. Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial	45.000	45.000	100%	45.000	45.000	100%
6	Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Puas	Puas	100%	Puas	Puas	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 10 indikator kinerja yang mendukung 6 sasaran kegiatan telah berhasil mencapai target. Berikut ini adalah uraian terhadap pencapaian tersebut:

1. **Meningkatnya Layanan Pengembangan TIK yang Terintegrasi**

a. **Pengembangan Aplikasi yang Terintegrasi**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Bidang Data dan Layanan Informasi merujuk kepada Cetak Biru TIK 2020-2024. Pada tahun 2022 terealisasi tiga kegiatan pengembangan aplikasi yang terintegrasi, realisasi tersebut sama dengan tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan ini sedikit tertunda pelaksanaannya, pada awalnya, kegiatan ini akan dilakukan pada semester I tahun 2022. Akan tetapi, akibat adanya proses *clearance* dan revisi anggaran kegiatan ini baru bisa dilaksanakan pada semester II tahun 2022. Rincian dari ketiga kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

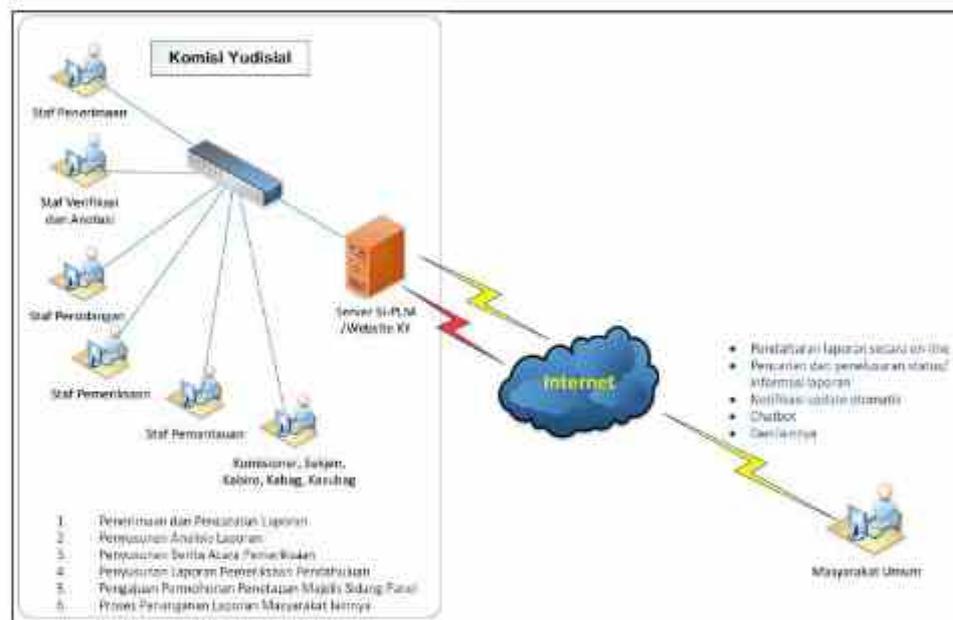
1) **Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM)**

SIPLM merupakan salah satu aplikasi utama KY yang mendukung proses bisnis utama dan berperan langsung terhadap keberhasilan pencapaian visi, misi, dan strategi KY. SIPLM merupakan sistem informasi yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KY dalam melayani masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). SIPLM merupakan aplikasi berbasis web (web based) yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan pangkalan data MySQL. Pengembangan SIPLM mengacu

kepada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat.

SIPLM versi terbaru hasil dari pengembangan yang dilakukan mempunyai dua modul utama, yaitu:

1. PLM *Transaction* yang merupakan modul alur proses penanganan laporan masyarakat.
2. PLM *Website* yang merupakan modul situs PLM untuk situs Komisi Yudisial.



Gambar 3.1

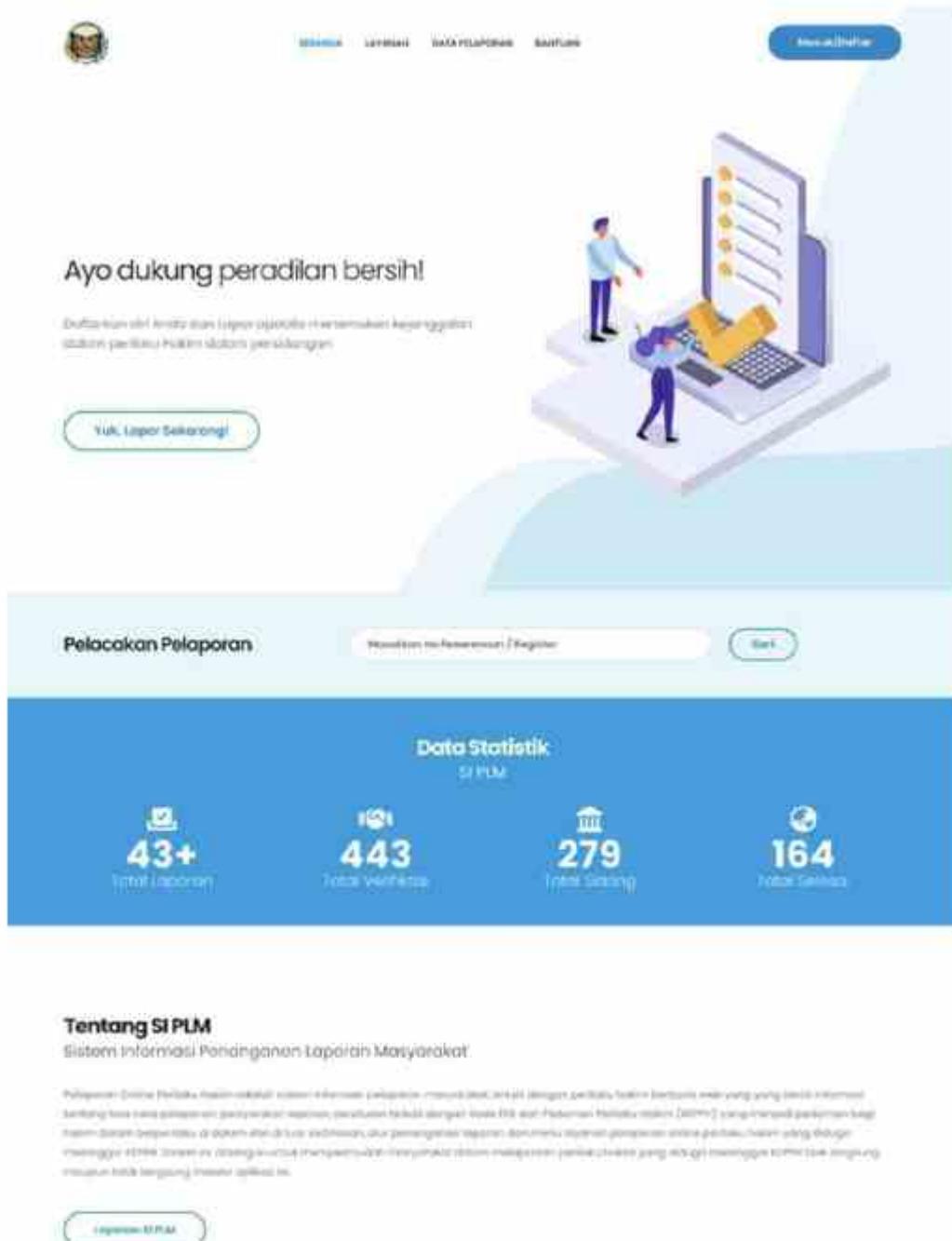
Arsitektur SIPLM yang Akan Dikembangkan

Rancangan pengembangan SI-PLM berbasis web ini bertujuan agar dapat menerima, menampung dan mengolah laporan yang dikirimkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. SIPLM yang dikembangkan diharapkan dapat menyajikan informasi tentang status laporan dan terintegrasi dengan aplikasi utama KY dan aplikasi terkait lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengacu kepada prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan sesuai dengan

pembaruan proses bisnis pengawasan hakim yang telah ditetapkan dan berlaku di KY.

Berikut ini adalah fitur-fitur yang dibangun dalam SIPLM versi terbaru untuk melengkapi fitur yang sudah ada di SIPLM saat ini:

- a. Manajemen sistem dan konfigurasi sistem.
- b. Integrasi modul PLM *transaction* dan PLM *website*.
- c. Otomasi pembuatan laporan dan statistik.
- d. Fitur email dan chat.
- e. *Multiuser* dan *multiplatform*.
- f. Interoperabilitas.
- g. Chatbot.
- h. Fasilitas notifikasi (peringatan dan pemberitahuan)
- i. Peningkatan fitur pencarian/search yang lebih.
- j. Tanda tangan digital.
- k. Alur penanganan laporan masyarakat.
- l. Sirkulasi dan penyimpanan data digital.
- m. Pembaruan *front end*, *back end* dan *engine*.
- n. Fitur penelusuran (*tracking*) laporan



Gambar 3.2.

Tampilan SIPLM yang Sudah Diperbarui

Dalam proses pengembangan SIPLM terdapat satu kendala utama yang dihadapi. Pengembangan SIPLM dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan KY tentang Penanganan Laporan Masyarakat yang lama. Sementara, peraturan tersebut saat ini tengah dilakukan revisi. Dengan kondisi tersebut diharapkan

Peraturan KY tentang Penanganan Laporan Masyarakat hasil revisi mempertimbangkan kondisi aplikasi yang tersedia. Dengan demikian, perubahan peraturan tersebut nantinya tidak mengubah aplikasi secara keseluruhan.

2) Pengembangan Aplikasi E-Performance

Aplikasi kedua yang dikembangkan pada tahun 2022 adalah *e-performance*. Aplikasi ini berfungsi untuk memonitor akuntabilitas kinerja KY. *E-performance* memuat empat fitur utama yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.



Gambar 3.3
Tampilan Salah Satu Fitur Aplikasi *E-Performance*

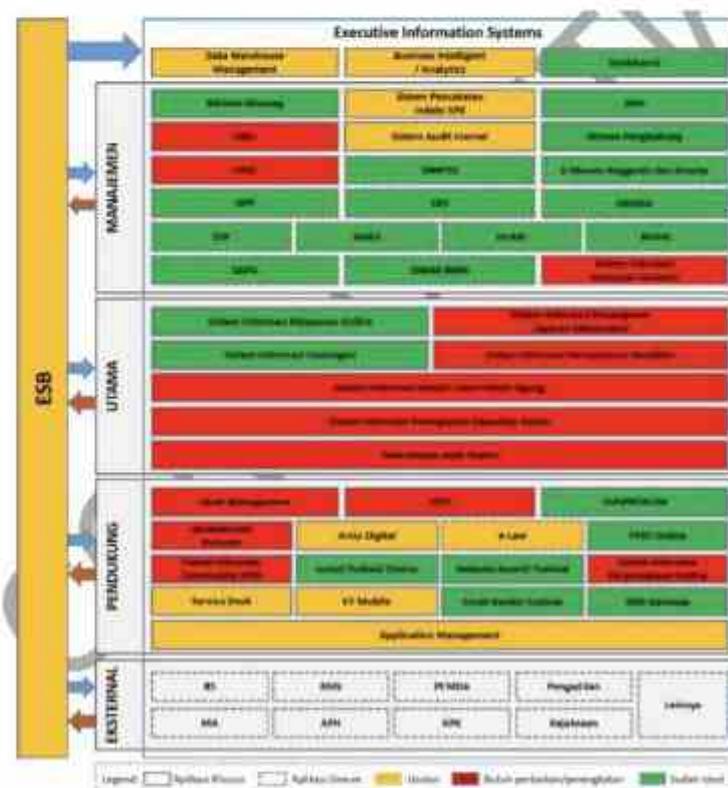
Proses bisnis aplikasi *e-performance* ialah mengintegrasikan kinerja individu pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di dalam aplikasi e-kinerja KY dengan sasaran program KY. Belum optimalnya penggunaan aplikasi e-kinerja menjadi hambatan utama yang dihadapi dalam mengintegrasikan data ke dalam aplikasi *e-performance*. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi *e-performance* adalah menyinkronkan *environment* aplikasi e-kinerja dengan *e-*

performance dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-kinerja KY.

3) Pengembangan Enterprise Service Bus (ESB)

Enterprises Service Bus (ESB) adalah suatu pendekatan *software architecture*. Konsep inti dari ESB ini adalah mengintegrasikan aplikasi yang berbeda dan ditempatkan pada *communication bus* sehingga aplikasi-aplikasi ini mampu membagi informasi melalui "bus".

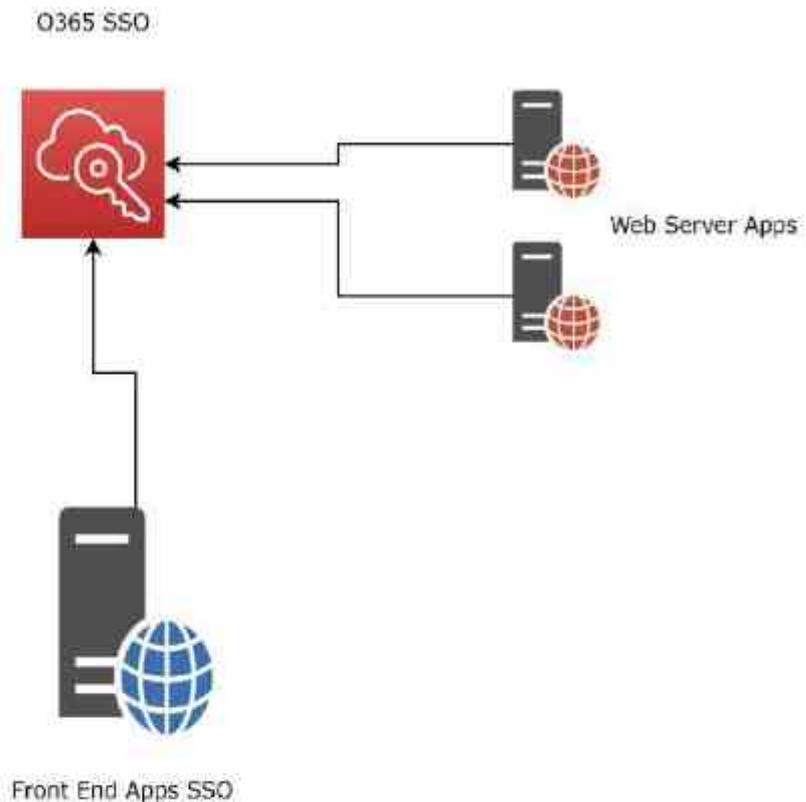
Untuk memfasilitasi komunikasi data dan integrasi antar aplikasi yang ada, pengembangan *Enterprises Service Bus* (ESB) menjadi salah satu solusi. Sesuai dengan dokumen Cetak Biru TIK KY 2020-2024, ESB menjadi target dalam pengembangan arsitektur aplikasi di KY.



Gambar 3.4.

Arsitektur Aplikasi yang tertuang dalam Cetak Biru TIK

Pengembangan ESB menggunakan *office 365* untuk otentifikasi integrasi pengguna pada masing-masing aplikasi yang akan diintegrasikan.



Gambar 3.5.

Rancangan Pengembangan Otentifikasi Terpusat/*Single Sign On (SSO)* pada Implementasi *Enterprises Service Bus (ESB)*

Adapun tahapan pengembangan ESB adalah:

Integration

- *API management*
- *Rate and throttling*
- Implementasi *single sign on (SSO)*:
 - *Stage O365*
 - *Stage back end svr apps KY*
 - *SSO portal*
 - *Testing, review*



Gambar 3.6

Rancangan Tampilan *Single Sign On (SSO)* Pada Implementasi ESB

Mengacu kepada uraian di atas, target pengembangan tiga aplikasi yang terintegrasi telah tercapai. Adapun kendala yang dihadapi adalah proses clearance dan revisi anggaran yang baru selesai pada semester II. Hal itu menyebabkan pelaksanaan kegiatan baru bisa dilaksanakan pada akhir semester II.

b. Persentase Pemutakhiran Data dan Informasi

Target untuk sasaran kegiatan persentase pemutakhiran data dan informasi adalah 60%. Pencapaian dari target tersebut dihitung berdasarkan jumlah data hakim yang dimutakhirkan dibandingkan dengan total data hakim yang dimiliki KY yang berjumlah lebih kurang 8.600. Selama tahun 2022, 5.590 data hakim telah dimutakhirkan. Data dari Tim Promosi Mutasi (TPM) masing-masing badan peradilan menjadi sumber pemutakhiran data hakim. Adapun rincian data hakim yang telah dimutakhirkan adalah sebagai berikut:
Tahun 2020:

1. Data TPM Pengadilan Negeri: 1700 data.
2. Data TPM Pengadilan Agama: 905 data.

Tahun 2021:

1. Data TPM Badan Peradilan Umum: 1449 data.
2. Data TPM Badan Peradilan Agama: 1381 data.
3. Data TPM Badan Peradilan TUN & Militer: 155 data.

Pada tahun 2021, pencapaian dari target sasaran kegiatan ini adalah 51,57%. Sedangkan untuk tahun 2022, melihat dari uraian di atas, data yang dimutakhirkan meningkat menjadi 60% dari data hakim yang dimiliki KY. Atas dasar tersebut, capaian kinerja untuk sasaran kegiatan ini adalah 100%.

Selain bersumber dari TPM, pemutakhiran data juga dilakukan dengan memvalidasi data seleksi calon hakim agung, data hakim yang mengikuti pelatihan KY, dan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sebagai hasil dari kerja sama yang dilakukan dengan KY.

Adapun kendala dalam memutakhirkan data hakim dengan mengandalkan data dari TPM adalah hal tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung/waktu nyata/real time. Ditambah lagi, data yang dapat dimutakhirkan sebatas jabatan masing-masing hakim sesuai hasil TPM. Adapun data yang lain semisal riwayat pendidikan, riwayat pelatihan, dan lain-lain belum dapat dilakukan. Untuk menjawab permasalahan mendasar ini, integrasi data hakim antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sangat diharapkan dapat segera terwujud.

2. Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif

Kegiatan ini merupakan implementasi dari penerapan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang merujuk pada praktik terbaik ISO 27001:2013. Selain itu, kegiatan ini merupakan komitmen KY terhadap isu keamanan informasi yang mencakup aspek *confidentiality, integrity, dan availability* (CIA).

Audit Summary



- **MAJOR : 0.**
- **MINOR : 3 OFI: 4**

**RECOMMENDED TO CONTINUE CERTIFICATE ISO/IEC 27001:2013
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS**

SCOPE

The Provision of Information Security Management Systems
of Data Center, Help Desk, Application and Infrastructure
Operation at Data and Information Services

This is in accordance with Statement of Applicability No.13/ALD/IS/04/02/2021, rev 4.0, 21 Feb 2020



Gambar 3.7

Audit Summary Sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 Tahun 2022 Komisi Yudisial

Berdasarkan ringkasan hasil audit SMKI yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi eksternal, KY dinyatakan berhak untuk mempertahankan sertifikat ISO 27001:2013 dengan ruang lingkup data center, help desk, pengelolaan aplikasi, dan infrastruktur di Bidang Data dan Layanan Informasi. Dengan hasil tersebut, target dari indikator kinerja sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi tercapai 100%. Apabila dibandingkan, hasil audit SMKI tahun 2021 mengandung satu temuan minor, sedangkan hasil audit SMKI tahun 2022 mengandung tiga temuan minor. Ketiga temuan minor tersebut terkait dengan risk register, inventarisir aset dan reviu hak akses pada beberapa aplikasi.

Menindaklanjuti temuan tersebut, tim SMKI Bidang Data dan Layanan informasi telah mengirimkan rencana tindakan korektif kepada lembaga sertifikasi eksternal yang mengaudit SMKI di KY tersebut.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Bidang Data dan Layanan Informasi pada tahun 2022 dalam mengimplementasikan SMKI adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan struktur organisasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Komisi Yudisial Tahun 2022.
- b. Menyiapkan dokumen kebijakan dan prosedur sesuai standar ISO 27001:2013.
- c. Sosialisasi dokumen dan *awareness* SMKI.
- d. Evaluasi dan monitoring implementasi SMKI.
- e. Audit internal (3-5 November 2022).
- f. Tinjauan manajemen (13 November 2022).
- g. Audit sertifikasi SMKI (7-9 Desember 2022).



Gambar 3.8

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Bersama Tim SMKI Mendampingi Auditor Eksternal Saat Melakukan Audit di *Disaster Recovery Center* Komisi Yudisial

Audit SMKI ISO 27001:2013 ini juga menunjang beberapa indikator dalam evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dilakukan KY di tahun 2022. Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sebagai kementerian yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi, belum memberikan hasilnya.

Selain itu, sebagai wujud komitmen dalam penanganan insiden siber, KY telah membentuk tim penanganan insiden siber di tahun 2022. Sebelum membentuk tim tersebut, KY melakukan koordinasi dan konsolidasi secara intensif dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pada tanggal 27 Oktober 2022, KY secara resmi meluncurkan Komisi Yudisial *Computer Security Incident Response Team* (KY-CSIRT).

3. Terlaksananya penelitian dan pengkajian

Target indikator kinerja pada sasaran kegiatan terlaksananya penelitian dan pengkajian adalah tiga rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian. Pada tahun 2022, Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi berhasil menghasilkan tiga rekomendasi sebagaimana dimaksud.

a. Kajian Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

• Pengelolaan Administrasi Fungsional Penata Kehakiman

Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (JFPK) merupakan jabatan fungsional tertentu yang secara khusus berada di internal KY. JFPK dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 (Permenpan RB No. 84 Tahun 2020). Munculnya JFPK kemudian diikuti dengan perubahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam peraturan tersebut terdapat satu struktur baru di Pusat Analisis dan Layanan Informasi yaitu Subbidang Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (UPJFPK) yang berada di bawah Bidang Analisis. Dengan penambahan ini nomenklatur dari Bidang Analisis menjadi Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

Pengelolaan administrasi terhadap JFPK yang dilakukan UPJFPK pada tahun 2022 di antaranya meliputi proses persiapan, analisis berkas dan penyimpulan keputusan terkait dengan proses inpassing jabatan fungsional umum dan struktural ke JFPK. Selain itu, unit pembina juga melakukan kegiatan lokakarya finalisasi modul pelatihan untuk JFPK jenjang ahli muda dan evaluasi pelaksanaan inpassing JFPK pada 6 Desember 2022 di Novotel Hotel Cikini. Hasil dari kedua kegiatan ini adalah saran dan masukan tentang keberadaan JFPK dan pelaksanaan tugas-tugasnya yang telah dilakukan dalam kurun waktu dua bulan sejak Oktober 2022 serta penyempurnaan modul pelatihan untuk JFPK jenjang ahli muda.

- **Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman**

KY telah melakukan proses inpassing bagi para pejabat fungsional umum dan pejabat pengawas untuk menjadi JFPK. Proses inpassing tersebut diikuti oleh 66 pegawai negeri sipil (PNS) di Biro Pengawasan Hakim, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim serta Biro Investigasi. Pengangkatan dan pengambilan sumpah JFPK gelombang pertama dilakukan pada 30 September 2022, diikuti oleh 54 PNS. Pengangkatan dan pengambilan sumpah JFPK gelombang kedua dilakukan pada 6 Desember 2022, diikuti oleh 12 PNS.

b. Kajian Metode Penafsiran dalam Putusan Sidang Pleno

Kajian metode penafsiran putusan sidang pleno dilakukan terhadap 18 putusan sidang pleno atas laporan masyarakat kepada KY mengenai putusan pengadilan dalam rentang waktu tahun 2017-2021. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan analisis secara ilmiah dan memberikan penjelasan kepada Pimpinan KY mengenai kecenderungan metode penafsiran yang dipakai dalam putusan sidang pleno.

Dalam melaksanakan kajian ini Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (Bidang Analisis dan UPJFPK) bekerja sama dengan Subbagian Persidangan pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Bidang Analisis dan UPJFPK meminta izin untuk melaksanakan kajian ini serta meminta putusan sidang pleno sebagai bahan data primer untuk kajian ini kepada Subbagian Persidangan. Bidang Analisis dan UPJFPK dalam melaksanakan kajian ini juga melakukan konsultasi dengan pakar dari Universitas Islam Indonesia yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan sidang pleno di KY. Hasil kajian ini telah disampaikan kepada Anggota KY/Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan. Rekomendasi yang dihasilkan dari kajian tersebut adalah:

- Membuat dalil yang kuat dalam menyusun pertimbangan etik dengan menghubungkan antara fakta peristiwa yang ada dan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis;
- Menjalin komunikasi yang baik dengan Mahkamah Agung untuk melakukan pemaknaan bersama terkait definisi *teknis yudisial*;
- Perlu melakukan tinjauan ulang terhadap Peraturan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012, mengenai kesesuaiannya dengan Putusan MA RI No. 36 P/HUM/2011;
- Perlu melakukan tinjauan ulang mengenai Peraturan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012, khususnya dengan adanya Pasal 15 dan Pasal 16.

c. Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi

Selama tahun 2022, kegiatan karakterisasi putusan berbasis aplikasi telah memilih 15 putusan dari perkara perdata, pidana, agama dan TUN. Kelima belas putusan tersebut juga dilengkapi dengan 47 putusan yang mengikuti kaidah hukum dalam yurisprudensi. Hal ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran bahwa setiap yurisprudensi seharusnya diikuti oleh minimal dua putusan lain. Kelima belas putusan tersebut juga diperkaya dengan 45 anotasi yang dilakukan oleh para akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang kredibel.

Anotasi dilakukan bukan untuk menilai baik atau buruk kaidah tersebut, melainkan untuk memberikan catatan perkembangan dari kaidah hukum tersebut dari perspektif akademik yang dinamis. Ketiga langkah dalam kegiatan karakterisasi ini, sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya referensi terkait dengan putusan khususnya bagi hakim dan secara umum bagi masyarakat.

Pada kegiatan ini Bidang Analisis dan UPJFPK melakukan beberapa kerja sama dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam penulisan anotasi putusan yurisprudensi. Bidang Analisis dan UPJFPK juga melakukan konsultasi dengan beberapa pakar akademisi dari dua universitas yang memiliki pengalaman dan kompeten di bidang hukum untuk memberikan penilaian (review) terhadap anotasi putusan yurisprudensi yang dibuat. Dengan melakukan hal tersebut, hasil karakterisasi putusan yang diunggah ke dalam sistem informasi dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Tabel 3.2

Daftar 15 Putusan yang Dijadikan Objek Karakterisasi Tahun 2022

NO	NOMOR PUTUSAN	BIDANG HUKUM	JUMLAH PUTUSAN PENGIKUT
1	908K/Pid/2006	Pidana	3
2	Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 592K/PID/1984	Pidana	3
3	Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1600K/PID/2009	Pidana	2
4	Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 628K/PID/1984	Pidana	3
5	Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 213K/TUN/2007	Tata Usaha Negara	3
6	Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 98K/TUN/1998 tanggal 8 Februari 2000	Tata Usaha Negara	2
7	314 K/TUN/1996	Tata Usaha Negara	4
8	55K/AG/1998	Agama	2
9	329 K/AG/2011	Agama	4
10	Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010	Agama	3
11	Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 334 K/AG/2005	Agama	2
12	Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 155K/PDT/2012	Perdata	2
13	Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2356K/PDT/2008	Perdata	5
14	Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008	Perdata	2
15	Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001	Perdata	7

Pada tahun 2022, program karakterisasi putusan secara total mendapatkan 107 dokumen. Kegiatan karakterisasi putusan berbasis aplikasi ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Seluruh putusan berikut dokumen penunjangnya diunggah ke dalam sistem informasi karakterisasi putusan yang berbasis web dengan alamat karakterisasi.komisiyudisial.go.id, dan berbasis android serta ios;
- 2) Pengunggahan putusan berikut dokumen penunjangnya tersebut bertujuan agar isi dari putusan tersebut dapat tersampaikan kepada khalayak luas, khususnya para hakim, akademisi, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat sebagai referensi dalam pembuatan dan penyusunan putusan atau materi hukum lainnya.

Rekomendasi sebagaimana disebutkan di atas telah diterima. Rencananya, rogram karakterisasi putusan berbasis aplikasi akan dilaksanakan kembali pada tahun 2023. Hal penting yang didapat sebagai cerminan dari keberlangsungan kegiatan ini pada tahun 2022 adalah cukup tingginya jumlah pengunjung situs karakterisasi.komisiyudisial.go.id dan melakukan unduhan hasil karakterisasi tersebut dengan total 23.026 ip address.

d. Analisa Putusan

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Bidang Analisis dan UPJFPK pada tahun 2022 melaksanakan kegiatan analisis putusan bekerja sama dengan dua perguruan tinggi, negeri dan swasta, dan dua LSM. Walaupun saat ini KY tidak terlibat dalam proses

promosi-mutasi di MA, kegiatan analisis putusan ini tetap dilakukan untuk membangun pangkalan data khususnya untuk pengayaan data putusan hakim dalam rangka menjaring calon hakim agung potensial. Aspek penilaian yang digunakan dalam melakukan analisis putusan ini telah diuji sehingga memiliki cakupan yang luas dengan indikator dan metode yang ilmiah. Hal tersebut dilakukan agar hasil analisis putusan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Kegiatan analisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dijalankan dalam tiga tahapan, yakni:

- 1) Pengumpulan putusan dan pemetaan mitra perguruan tinggi dan LSM.

Mitra yang terpilih untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Institutes for Criminal Justices Reform (ICJR) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI). Pada tahun 2022 putusan berkekuatan hukum tetap yang dianalisis oleh para mitra di atas berjumlah 40 putusan.

- 2) Pelaksanaan analisis putusan oleh mitra.

Agar kegiatan analisis putusan sesuai dengan standar, KY menyediakan metode dan kertas kerja yang dapat digunakan oleh para mitra. Pelaksanaan analisis putusan diawali dengan menyamakan persepsi antara KY dan mitra serta tim pakar. Proses selanjutnya adalah mengumpulkan isu dalam menganalisis putusan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan reviu terhadap draf final hasil analisis putusan.

- 3) Diseminasi hasil analisis putusan oleh para mitra di tempat kedudukan.

Dari keseluruhan tiga kegiatan penelitian dan pengkajian yang dilakukan sebagaimana uraian di atas, diperoleh tiga rekomendasi. Setiap satu kegiatan penelitian dan pengkajian menghasilkan satu rekomendasi. Ketercapaian Palinfo untuk target indikator kinerja ini dihitung dengan formula jumlah rekomendasi penelitian dan

pengkajian yang dihasilkan dibagi dengan jumlah rekomendasi penelitian dan pengkajian yang ditargetkan kemudian dikalikan 100%. Berdasarkan rumus tersebut maka ketercapaian target indikator kinerja rekomendasi penelitian dan pengkajian adalah $3 : 3 \times 100 \% = 100\%$.

Pada tahun 2023 indikator kinerja ini masih memasang target yang sama yaitu tiga rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Renstra. Oleh sebab itu upaya atau strategi untuk mencapai target yang akan dilakukan oleh Bidang Analisis dan UPJFPK di tahun 2023 akan identik dengan yang dilakukan pada tahun 2022.



Gambar 3.9

Sampul Muka Laporan Hasil Kajian Metode Penafsiran dalam Putusan Sidang Pleno

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Manfaat	2
BAB II KAJIAN PUSTAKA	3
A. Pengertian Etik	3
B. Teori Etik	3
C. Prinsip-prinsip Etik	3
D. Fungsi Etik	3
E. Mekanisme Etik	3
F. Jenis-jenis Etik	3
G. Tantangan Etik	3
H. Model Etik	3
I. Penutup	3
BAB III METODE PENELITIAN	4
A. Pendekatan Penelitian	4
B. Jenis Penelitian	4
C. Lokasi Penelitian	4
D. Waktu Penelitian	4
E. Instrumen Penelitian	4
F. Teknik Pengumpulan Data	4
G. Teknik Analisis Data	4
H. Validasi Instrumen	4
I. Etika Penelitian	4
J. Kesimpulan	4
DAFTAR PUSTAKA	5

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Manfaat	2
BAB II KAJIAN PUSTAKA	3
A. Pengertian Etik	3
B. Teori Etik	3
C. Prinsip-prinsip Etik	3
D. Fungsi Etik	3
E. Mekanisme Etik	3
F. Jenis-jenis Etik	3
G. Tantangan Etik	3
H. Model Etik	3
I. Penutup	3
BAB III METODE PENELITIAN	4
A. Pendekatan Penelitian	4
B. Jenis Penelitian	4
C. Lokasi Penelitian	4
D. Waktu Penelitian	4
E. Instrumen Penelitian	4
F. Teknik Pengumpulan Data	4
G. Teknik Analisis Data	4
H. Validasi Instrumen	4
I. Etika Penelitian	4
J. Kesimpulan	4
DAFTAR PUSTAKA	5

**BAB IV
PENUTUP**

A. Kesimpulan

Komis Yudisial melalui Majelis Sidang Pleno, dalam memberikan pertimbangan etik, lebih banyak menggunakan metode penafsiran sistematis (43,72 %) dan lalu penafsiran gramatikal (37,5 %). Majelis Sidang Pleno juga pernah memberikan pertimbangan etik tanpa menggunakan metode penafsiran apapun sebesar 15,625%. Hal ini perlu diperbaiki, karena Komisi Yudisial adalah pengawas eksternal dari kekuasaan kehakiman. Putusan Sidang Pleno merupakan produk dari Komisi Yudisial yang sudah seharusnya memberikan contoh terbaik dalam membuat suatu pertimbangan dalam suatu putusan.

Dari pengamatan di lapangan, bagi MA, teknis yudisial adalah segala hal yang berhubungan dengan putusan hakim. Sedangkan bagi KY, di dalam putusan hakim bisa juga terjadi pelanggaran etika. Perbedaannya pendapat tersebut belum mencapai pemahaman yang sama sampai dengan saat ini.

Sejatinya KY dalam melakukan pengawasan masih dapat menggunakan Angka 8 Berdisiplin Tinggi (*tanpa narasari*) dan Angka 10 Berakap Profesional (*tanpa narasari*) dalam melakukan pengawasan eksternal. Namun, rekomendasi tersebut tidak diterima oleh MA, yang diantaranya menyatakan bahwa KY tidak mempunyai kewenangan memeriksa Angka 8 dan Angka 10. Hal ini bisa menjadi kesalahpahaman yang cukup fatal karena, Putusan MA RI No. 36 P/HUM/2011 hanya membatalkan turunan dari Angka 8 dan Angka 10 saja.

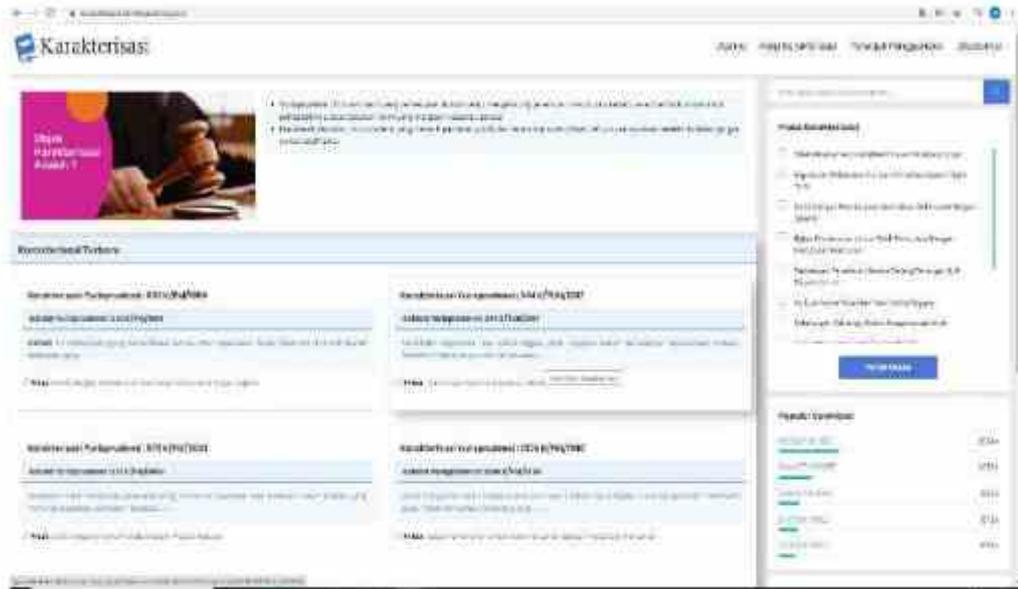
B. Saran

Dari kesimpulan yang telah disebutkan, maka saran yang diberikan:

- 1) Dalam membuat pertimbangan etik, agar selalu membuat dalil yang kuat yang menghubungkan antara fakta peristiwa yang ada dengan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis);
- 2) Menjalin komunikasi yang baik dengan MA untuk melakukan pemaksaan bersama terkait definisi *sebut yudisial*;

Gambar 3.10

Isi Laporan Hasil Kajian Metode Penafsiran dalam Putusan Sidang Pleno



Gambar 3.11
Tampilan Aplikasi Karakterisasi Putusan

Pada tahun 2022, Bidang Analisis dan UPJFPK juga melakukan kegiatan penunjang di luar sasaran kegiatan yang ada dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Para pejabat fungsional analis hukum yang ada di Bidang Analisis dan UPJFPK dilibatkan oleh Bagian Rekrutmen Hakim Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim untuk membuat soal kasus hukum kamar pidana, perdata, agama, TUN, dan TUN khusus pajak yang akan dipergunakan dalam seleksi kualitas calon hakim agung. Kegiatan ini dilakukan pada akhir semester II tahun 2022.

4. Meningkatnya efektifitas komunikasi publik melalui media maupun langsung

a. Layanan Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran kegiatan keempat dari Palinfo adalah adalah meningkatnya efektivitas komunikasi publik melalui media maupun langsung. Salah satu target indikator kinerja yang harus dicapai Palinfo dalam sasaran kegiatan ini adalah predikat “Menuju Informatif” dari Komisi Informasi Pusat terhadap pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik di tahun 2022. Kegiatan tersebut dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Yudisial. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengamanatkan pembentukan PPID untuk bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Wujud dukungan KY terhadap keterbukaan informasi publik adalah menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik. Dalam perjalanannya, peraturan tersebut mengandung banyak kekurangan dan belum dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan informasi kepada publik. Peraturan tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Peraturan tersebut saat ini menjadi payung hukum kegiatan pelayanan informasi publik di KY.

Pelayanan informasi publik merupakan kegiatan rutin. Masyarakat dapat mengakses layanan ini secara langsung ataupun daring melalui situs www.ppid.komisiyudisial.go.id, yang ramah pengguna. PPID KY pada tahun 2022 menerima enam permohonan informasi. Jenis informasi yang diminta tidak seluruhnya dapat diberikan karena menyangkut informasi pribadi dan tidak di bawah penguasaan KY. PPID KY berusaha menjawab atau merespons permohonan informasi berupa pemberitahuan tertulis sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sejak permohonan diterima, sesuai dengan standar pelayanan publik.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Laporan Pelayanan Informasi PPID KYRI
1 Januari – 31 Desember 2022

BULAN	PERMOHONAN INFORMASI	DIKABULKAN SEBAGIAN	DIKABULKAN SELURUHNYA	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN	WAKTU PENYELESAIAN
JANUARI	0	0	0	0	0	0
FEBRUARI	1	0	0	1	Tidak di bawah penguasaan KY	4 hari kerja
MARET	2	0	2	0	0	3 hari kerja
APRIL	3	3	0	3	Tidak di bawah penguasaan KY dan terdapat data pribadi individu	3 hari kerja
MEI	0	0	0	0	0	0
JUNI	0	0	0	0	0	0
JULI	0	0	0	0	0	0
AGUSTUS	0	0	0	0	0	0
SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0
OKTOBER	0	0	0	0	0	0
NOVEMBER	0	0	0	0	0	0
DESEMBER	0	0	0	0	0	0

Sebagai wujud akuntabilitas, PPID KY juga melakukan pemutakhiran konten informasi publik di situs KY www.komisiyudisial.go.id dan situs PPID KY www.ppid.komisiyudisial.go.id. Informasi yang dimutakhirkan adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui situs KY, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data atau informasi tentang wewenang dan tugas KY, laporan keuangan KY, rencana kerja dan anggaran, DIPA, laporan kinerja KY, informasi pengadaan, dan peraturan. Selain melalui situs, informasi juga disajikan melalui media sosial KY yaitu facebook

(@komisiyudisialri), twitter (@komisiyudisial), dan instagram (@komisiyudisialri).

KY terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi publik melalui berbagai media. Salah satunya adalah melakukan pemutakhiran aplikasi PPID online yang lebih dinamis dan responsif. Dari sisi engine aplikasi dilakukan pemutakhiran dengan framework terbaru. Terkait informasi dan data yang disajikan juga sudah dilakukan pemutakhiran dan penyesuaian tampilan untuk masing-masing informasi. Untuk aksesibilitas dan tampilan, aplikasi PPID online sudah dilengkapi dengan fitur ramah difabel (web accessibility). Inovasi ini memungkinkan akses informasi pada situs PPID dan layanan permohonan daring bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Fitur ramah difabel yang ada di aplikasi PPID online adalah responsive voice, text to speech, perbesar/perkecil teks, warna abu-abu, kontras tinggi, kontras negatif, latar belakang terang, garis bawah teks, dan ukuran huruf yang mudah terbaca.



Gambar 3.12

Ruang Pelayanan Informasi Publik Komisi Yudisial

Selain itu, untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, aplikasi PPID online juga dilengkapi dengan fitur chatbot yang terkoneksi dengan WhatsApp resmi KY. Dengan fitur tersebut masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan PPID KY.

Pada tahun 2022, Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 09/KEP/KIP/XII/2022 tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Public Pada Badan Public Tahun 2022 memberikan predikat "**Menuju Informatif**" kepada KY untuk kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal keterbukaan informasi publik. KY memperoleh nilai 84,42. Rincian dari nilai yang diperoleh tersebut yaitu sarana dan prasarana (10), kualitas informasi (8,5), jenis informasi (32,8), komitmen organisasi (8,5), digitalisasi (17), barang dan jasa (6,1), dan hasil presentasi (13,95), sehingga total nilai yang diperoleh 84,42. Dengan merujuk kepada target indikator kinerja untuk kegiatan ini yaitu predikat "Menuju Informatif", Palinfo telah memenuhi target tersebut atau 100%.

2. Menuju Informatif

KEMENTERIAN		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1	Kementerian Pemuda dan Olahraga	80,76

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	89,38
2	Badan Informasi Geospasial	87,69
3	Badan Pemeriksa Keuangan	84,60
4	Badan Riset dan Inovasi Nasional	84,50
5	Komisi Yudisial	84,42
6	Perpustakaan Nasional	83,89
7	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	83,72
8	Majelis Permusyawaratan Rakyat	79,88

Pencapaian target tersebut dihitung dengan formula: capaian keterbukaan informasi publik dibagi target keterbukaan informasi publik x 100%. Akan tetapi, capaian ini sedikit menurun bila dibandingkan

dengan tahun 2021. Saat itu, KY memperoleh predikat “**Informatif**” untuk layanan keterbukaan informasi publik. Hambatan yang dihadapi dalam kegiatan ini antara lain kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menjadi rujukan dalam pengisian SAQ Money Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.



Gambar 3.13
Alur Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

b. Kategori Publisitas Positif Melalui Media Monitoring

Untuk sasaran kegiatan meningkatnya efektifitas komunikasi publik melalui media maupun langsung, Palinfo memiliki indikator kinerja kedua yang harus dipenuhi, yaitu kategori publisitas positif KY melalui media monitoring. Untuk mengetahui sejauh mana hasil publikasi KY, maka perlu dilakukan media monitoring baik untuk media massa cetak, daring, ataupun media sosial melalui insight social media. Media monitoring adalah kegiatan pengumpulan data dari berbagai saluran media untuk dianalisis dan diidentifikasi. Proses ini meliputi membaca, menonton, mencatat sampai mendengarkan sebuah konten editorial yang merupakan sumber media. Proses pemantauan akan

menghasilkan suatu informasi tentang reputasi KY di mata media cetak dan daring termasuk media sosial. Monitoring media ini dapat dijadikan acuan bagi lembaga dalam membuat dan menentukan sebuah kebijakan yang tepat.

Sebelum mengetahui sejauh mana hasil publikasi yang diterima, Palinfo perlu melakukan pengelolaan media massa dan media sosial. Palinfo menjalin hubungan dengan sebanyak mungkin media. Pada tahun 2022, Palinfo membina hubungan dengan 32 media massa untuk mencapai reputasi positif lembaga. Sementara itu, untuk pengelolaan media sosial dilakukan melalui Instagram @komisiyudisialri, Facebook @KomisiYudisial, Twitter @KomisiYudisal, dan YouTube @KomisiYudisial.

1) Pengelolaan Media Massa

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, KY membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat termasuk media massa. Pengelolaan media massa merupakan kegiatan rutin Palinfo yang dilakukan terutama oleh pranata humas. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu memberikan pelayanan informasi kepada wartawan seperti memenuhi kebutuhan data terkait capaian kinerja KY, memenuhi permohonan wawancara dalam hal ini melalui Juru Bicara KY, pelaksanaan konferensi pers, penyebaran siaran pers, media briefing terkait isu tertentu, media gathering untuk meningkatkan sinergi antara KY dan media massa, dan evaluasi pengelolaan media massa melalui diskusi dengan perwakilan media massa.

Selain itu, dilakukan pula dialog di RRI dengan narasumber Pimpinan dan Anggota KY sebagai wujud tindak lanjut perjanjian kerja sama antara KY dan RRI. Secara rinci, kegiatan pengelolaan media massa pada tahun 2022 terdiri atas 36 kali penyebaran siaran pers, 10 kali pelaksanaan konferensi pers, 1 kali media briefing, 1

kali media gathering, dan 1 kali evaluasi kegiatan pengelolaan media massa.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Kegiatan Pengelolaan Media Massa Tahun 2022

Hari, tanggal	Konferensi Pers	Siaran Pers
Bogor, 11 Januari 2022	Tidak dilaksanakan konferensi pers, hanya penyebaran siaran pers	Nomor: 01/Siaran Pers/AL/LI.04.01/01/2022 tentang KY Mulai Gelar Seleksi Kualitas CHA dan Calon Hakim ad hoc Tipikor di MA dengan Protokol Kesehatan Ketat
Jakarta, 31 Januari 2022	Dilaksanakan konferensi pers daring dihadiri 15 media massa.	Nomor: 02/Siaran Pers/AL/LI.04.01/01/2022 tentang KY Umumkan 55 Calon Hakim Agung dan 11 Calon Hakim ad hoc Tipikor MA yang Lulus di Seleksi Kualitas
Jakarta, 2 Maret 2022	Tidak dilaksanakan konferensi pers, hanya penyebaran siaran pers	Nomor: 03/Siaran Pers/AL/LI.04.01/02/2022 tentang 55 Orang Calon Hakim Agung Jalani Asesmen Kompetensi dan Kepribadian
Jakarta, 16 Maret 2022	Tidak dilaksanakan konferensi pers,	Nomor: 04/Siaran Pers/AL/LI.04.01/03/2022

	hanya penyebaran siaran pers	tentang 55 CHA dan 11 Calon Hakim ad hoc Tipikor di MA Jalani Pemeriksaan Kesehatan dan Kejiwaan
Jakarta, 20 April 2022	Dilaksanakan konferensi pers daring dihadiri 20 media massa.	Nomor: 05/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/04/2022 tentang KY Terima 385 Laporan Masyarakat Dugaan Pelanggaran KEPPH di Triwulan Pertama Tahun 2022
Jakarta, 20 April 2022	Dilaksanakan konferensi pers daring dihadiri 20-an media massa.	Nomor: 06/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/04/2022 tentang KY Rekomendasikan Sanksi Terhadap 9 Hakim
Jakarta, 22 April 2022	Dilaksanakan konferensi pers daring dihadiri 20-an media massa.	Nomor: 07/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/04/2022 tentang KY Loloskan 21 Calon Hakim Agung dan ad hoc Tipikor di MA Menuju Wawancara
Jakarta, 25 April 2022	Tidak ada konferensi pers, tetapi mengundang media massa untuk hadir secara online dan diperkenankan bertanya melalui Youtube.	Nomor: 08/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/04/2022 tentang KY Mulai Seleksi Wawancara 21 Calon Hakim Agung dan ad hoc Tipikor di MA
Jakarta, 10 Mei 2022	Tidak dilaksanakan konferensi pers, hanya penyebaran siaran pers	Nomor: 09/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/05/2022 tentang KY Umumkan Hasil Seleksi Tahap Akhir CHA dan CH ad hoc Tipikor di MA

Jakarta, 22 Juni 2022	Tidak dilaksanakan konferensi pers, hanya penyebaran siaran pers	Nomor: 10/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/0/2022 tentang Konsolidasi KY dan MA untuk Mendorong Kemandirian Hakim dan Peradilan
Jakarta, 13 Juli 2022	Tidak dilaksanakan konferensi pers, hanya penyebaran siaran pers	Nomor: 11/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/07/2022 tentang KY dan MA Gelar Dua Sidang MKH: Satu Hakim Diberhentikan dengan Tidak Hormat
Jakarta, 25 Juli 2022	Dilaksanakan konferensi pers daring dihadiri 20-an media massa	Nomor: 12/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/06/2022 tentang KY Terima 721 Laporan Masyarakat Dugaan Pelanggaran KEPPH di Semester Pertama Tahun 2022
Jakarta, 25 Juli 2022	Dilaksanakan konferensi pers daring dihadiri 20-an media massa	Nomor: 13/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/06/2022 tentang KY Rekomendasikan Sanksi Terhadap 11 Hakim
Jakarta, 26 Juli 2022	Tidak dilaksanakan konferensi pers, hanya penyebaran siaran pers	Nomor: 14/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/06/2022 tentang Mangkir 80 Hari, Hakim MIT Diberhentikan dengan Tidak Hormat di Sidang MKH
Jakarta, 24 Agustus 2022	Tidak ada konferensi pers, tetapi mengundang media massa untuk hadir luring dan daring.	Nomor: 15/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/06/2022 tentang Semarak HUT KY ke-17, KY Gelar Seminar dan Pameran Kinerja Pengawasan Hakim

Jakarta, 30 Agustus 2022	Tidak dilaksanakan konferensi pers, hanya penyebaran siaran pers	Nomor: 16/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/08/2022 tentang Terbukti Terima Suap, Hakim HGU Diberhentikan Tidak dengan Hormat
Jakarta, 31 Agustus 2022	Dilaksanakan konferensi pers daring dihadiri 20-an media massa	Nomor: 17/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/08/2022 tentang KY Kembali Buka Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc di MA
Jakarta, 6 September 2022	Tidak dilaksanakan konferensi pers, hanya penyebaran siaran pers	Nomor: 18/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/09/2022 tentang KY dan Ombudsman Tanda Tangani Nota Kesepahaman terkait Pengawasan Hakim dan Pelayanan Publik
Jakarta, 22 September 2022	Tidak dilaksanakan konferensi pers, hanya penyebaran siaran pers	Nomor: 19/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/09/2022 tentang KY Raih WTP Lima Belas Kali Berturut-Turut
Jakarta, 28 September 2022	Tidak dilaksanakan konferensi pers, hanya penyebaran siaran pers	Nomor: 20/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/09/2022 tentang Resmi Ditutup, KY Terima 94 Pendaftar Calon Hakim Agung dan 15 Pendaftar Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA
Jakarta, 28 September 2022	Tidak dilaksanakan konferensi pers, hanya penyebaran siaran pers	Nomor: 21/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/09/2022 tentang KY dan MA Gelar Sidang MKH, 1 Hakim Diberhentikan

Jakarta, 4 Oktober 2022	Dilaksanakan konferensi pers daring dihadiri 20-an media massa	Nomor: 22/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/10/2022 tentang 88 Calon Hakim Agung dan 13 Calon Hakim ad hoc HAM di MA Lolos Seleksi Administrasi
Jakarta, 17 Oktober 2022	Tidak dilaksanakan konferensi pers, hanya penyebaran siaran pers	Nomor: 23/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/10/2022 tentang KY Gelar Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA
Jakarta, 3 November 2022	Dilaksanakan konferensi pers daring dihadiri 20-an media massa	Nomor: 24/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/11/2022 tentang KY Terima 1158 Laporan Selama Triwulan Ketiga 2022, Perkara Perdata Paling Banyak Dilaporkan
Jakarta, 3 November 2022	Dilaksanakan konferensi pers daring dihadiri 20-an media massa	Nomor: 25/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/11/2022 tentang KY Usulkan 19 Hakim Dijatuhi Sanksi
Jakarta, 4 November 2022	Tidak dilaksanakan konferensi pers, hanya penyebaran siaran pers	Nomor: 26/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/11/2022 tentang 29 Calon Hakim Agung dan 6 Calon Hakim ad hoc HAM di MA Lolos Seleksi Kualitas
Jakarta, 14 November 2022	Dilaksanakan konferensi pers daring dihadiri 30-an media massa	Nomor: 27/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/11/2022 tentang KY: Beberapa Delik terkait Peradilan dalam RKUHP Perlu Disesuaikan
Jakarta, 13 Desember 2022	Tidak dilaksanakan konferensi pers,	Nomor: 28/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/12/2022

		hanya penyebaran siaran pers	tentang KY: Keamanan di Pengadilan Perlu Diperkuat
Jakarta, Desember 2022	02	Tidak dilaksanakan konferensi pers, hanya penyebaran siaran pers	Nomor: 29/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/12/2022 tentang KY Terima Hibah Tanah dan Bangunan Barang Rampasan Negara di Surabaya dari KPK
Jakarta, Desember 2022	29	Dilaksanakan konferensi pers luring dan daring dihadiri 40-an media massa	Nomor: 30/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/12/20225 tentang Refleksi Akhir Tahun 2022: KY Terus Sempurnakan Kinerja untuk Pelayanan Publik Lebih Baik
Jakarta, Desember 2022	29	Dilaksanakan konferensi pers luring dan daring dihadiri 40-an media massa	Nomor: 31/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/12/2022 tentang Kinerja Rekrutmen Hakim KY 2022: KY Pastikan Akan Perketat Aspek Integritas
Jakarta, Desember 2022	29	Dilaksanakan konferensi pers luring dan daring dihadiri 40-an media massa	Nomor: 32/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/12/2022 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KY Tercatat Naik Setiap Tahun
Jakarta, Desember 2022	29	Dilaksanakan konferensi pers luring dan daring dihadiri 40-an media massa	Nomor: 33/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/12/2022 tentang KY Menindaklanjuti Penerapan Sistem Keamanan Persidangan dan Pengadilan serta Pembahasan RUU KY
Jakarta, Desember 2022	29	Dilaksanakan konferensi pers luring	Nomor: 34/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/12/2022

	dan daring dihadiri 40-an media massa	tentang KY Melatih 600 Hakim Sepanjang 2022 tentang KY Melatih 600 Hakim Sepanjang 2022
Jakarta, 29 Desember 2022	Dilaksanakan konferensi pers luring dan daring dihadiri 40-an media massa	Nomor: 35/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/12/2022 tentang KY Apresiasi Sinergi dengan MA dan Pemangku Kepentingan Lainnya di tahun 2022
Jakarta, 29 Desember 2022	Dilaksanakan konferensi pers luring dan daring dihadiri 40-an media massa	Nomor: 36/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/12/2022 tentang KY Usulkan 19 Hakim Dijatuhi Sanksi di Tahun 2022



Gambar 3.14

Pelaksanaan Konferensi Pers Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2022

Pada tahun ini, KY melaksanakan media gathering bertema Sinergitas Komisi Yudisial dengan Media Massa dalam Mewujudkan Peradilan Bersih pada Sabtu-Senin, 1-3 Oktober 2022 di Citarik, Sukabumi, Jawa Barat. Acara ini diikuti 20 media massa cetak dan daring berskala nasional. Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal KY.

Beliau menekankan pentingnya relasi antara KY dan media massa. Hal itu disebabkan informasi tentang capaian kinerja, kebijakan, ataupun upaya KY untuk mewujudkan peradilan bersih disebarluaskan oleh media massa. Pada acara tersebut, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D menyampaikan keynote speech dan tanya jawab dengan wartawan. Kegiatan media gathering ini juga diisi dengan arung jeram dan paintball untuk meningkatkan chemistry.



Gambar 3.15

Media *Gathering* yang Diikuti Puluhan Media Massa di Citarik, Sukabumi Pada 1-3 Oktober 2022

Untuk mengetahui sejauh mana persepsi wartawan terhadap kinerja Komisi Yudisial dan memperoleh masukan terkait komunikasi publik KY, Palinfo menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun mengulas evaluasi pengelolaan media massa pada Jumat-Minggu, 16-18 Desember 2022. Kegiatan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu melakukan media gathering setiap tahun dengan

mengundang narasumber dari luar KY, melakukan media briefing setiap bulan terkait isu-isu hukum dan peradilan yang menjadi wewenang KY, dan memberikan penghargaan untuk jurnalis.



Gambar 3.16

Rafting Bersama Dalam Rangkaian Media *Gathering*

2) Pengelolaan Media Sosial

Instansi pemerintah, termasuk KY mengadopsi media sosial sebagai saluran komunikasi strategis. Salah satu sifat yang dimiliki media sosial adalah interaktif. Sifat tersebut dapat menjadikan pengguna yang pasif menjadi aktif dalam aktivitas secara daring. Interaktivitas ini menjadi faktor pendorong bagi media sosial sebagai suatu platform ideal untuk mencapai tujuan komunikasi organisasi. Teknologi media baru ini memungkinkan organisasi, termasuk organisasi pemerintah untuk membangun keterlibatan dan hubungan dengan pemangku kepentingan utama. Melalui media sosial, KY berusaha menciptakan keterlibatan dengan publik dan berupaya untuk mengelola hubungan antara organisasi dan publik.

Berdasarkan data dari masing-masing akun media sosial KY yang diakses pada Desember 2022, tercatat ada 116.511 pengikut

Instagram, 21.907 pengikut Facebook, dan 74.400 pengikut Twitter. Adapun rincian mengenai penambahan atau pengurangan pengikut akun media sosial KY pada tahun 2022 yaitu +1.706 untuk Facebook, -589 untuk Twitter dan + 10,336 untuk Instagram.

Apabila dibandingkan antara data jumlah pengikut media sosial KY pada tahun 2021 dan 2022, dapat disimpulkan adanya sedikit kenaikan jumlah pengikut di media sosial Instagram. Namun, untuk Twitter dan Facebook mengalami penurunan. Hal ini merupakan suatu kendala bagi tim humas KY. Penurunan performa pada platform media sosial Facebook dan Instagram disebabkan oleh kurangnya pemetaan konten pilar menjadi konten turunan (penguasaan isu) serta masih kurangnya pemahaman pengelola terhadap semua fitur pada masing-masing media sosial.

Tabel 3.5
Konten Media Sosial Komisi Yudisial Tahun 2022

	Tema Media Sosial	Jumlah Konten
Januari 2022	Lembaga Peradilan	27
Februari 2022	Hakim	29
Maret 2022	Advokasi Hakim	31
April 2022	Penghubung Komisi Yudisial	30
Mei 2022	Layanan Komisi Yudisial	29
Juni 2022	Program Nasional Komisi Yudisial	30
Juli 2022	Etika Hakim	30
Agustus 2022	Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial	29
September 2022	Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial	30
Oktober 2022	Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial	30
November 2022	Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial	27
Desember 2022	Capaian Kinerja Komisi Yudisial	29

Tabel 3.6
Rekapitulasi *Engagement* Media Sosial Komisi Yudisial Tahun 2022

Bulan	Facebook		Twitter	Instagram		
	Reach	Interaksi	Tayangan	Kunjungan Profil	Reach	Interaksi
Januari	7.591	4.003	29.200	5.894	152.623	7.866
Februari	5.199	2.890	21.000	5.091	144.211	7.680
Maret	5.199	3.841	21.800	5.999	152.623	7.866
April	4.684	1.907	13.700	3.352	175.870	4.817
Mei	4.764	1.321	22.500	10.600	209.837	8.008
Juni	4.819	2.462	17.900	5.639	174.928	6.076
Juli	3.560	2.620	19.800	7.422	152.623	5.960
Agustus	5.960	7.044	37.800	15.900	196.459	10.360
September	4.880	6.020	24.500	11.800	231.598	10.390
Oktober	7.300	5.279	22.600	6.752	225.524	10.840
November	5.152	2.690	15.300	2.194	161.059	6.593
Desember	5.366	3.279	24.900	4.125	201.333	9.644

Berdasarkan tabel engagement tahun 2022 di atas, dapat dijelaskan bahwa jangkauan media sosial KY cenderung naik dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini disebabkan karena banyaknya isu-isu yang bersinggungan dengan KY menjadi perhatian publik. Adapun tone isu menunjukkan tone yang negatif terkait putusan peradilan kasus asusila Bechi, hakim terduga gunakan narkoba, OTT Hakim Agung, OTT Hakim Yustisia, dan persidangan FS.

Adapun strategi yang akan diambil oleh tim pengelola media sosial KY dalam menyikapi hambatan dan persoalan yang dihadapi adalah melakukan studi banding pengelolaan media sosial dengan kementerian/lembaga lain. Hal ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi pengelola media sosial KY dari K/L lain yang lebih baik dalam melakukan pengelolaan media sosial. Selain itu, pengelola media sosial KY juga perlu menambah wawasan dengan mengikuti pelatihan terkait pengelolaan media sosial serta keahlian teknis lain baik grafis ataupun videografi guna mengoptimalkan pembuatan konten. Dengan begitu, hambatan mengenai pemahaman

pengelolaan media sosial yang belum lengkap dapat diatasi sehingga kinerja pengelolaan media sosial dapat menjadi lebih efektif dan proporsional.

3) Pengelolaan Situs Web Komisi Yudisial

Sebagai etalase lembaga, maka situs web KY perlu dikelola secara profesional. Konten utama situs KY adalah berita tentang kegiatan Pimpinan, Anggota KY dan Sekretariat Jenderal KY. Jumlah total berita di situs web KY pada tahun 2022 adalah 198 berita. Situs web KY, <https://www.komisiyudisial.go.id>, dirancang dengan responsive web design (RWD) di mana tampilan situs secara otomatis bisa mengikuti atau menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan.

Situs web KY juga disajikan dalam bentuk bilingual (Indonesia-Inggris) dengan desain yang mengedepankan estetika. Situs web KY menggunakan jenis huruf tegas pada teks dan foto, infografik dan video beresolusi tinggi untuk tampilan visual yang optimal. Situs web mengambil warna bernuansa putih untuk memberikan kesan bersihsesuai dengan filosofi KY yang ingin mewujudkan peradilan bersih.

Navigasi situs web yang ditampilkan memberikan kemudahan bagi pengunjung saat mengaksesnya untuk mendapatkan informasi halaman pada masing-masing konten. Adapun komposisinya sudah menempatkan konten dengan tata letak teks, foto, infografis, video dan konten lainnya secara proporsional.

Untuk lebih mendekatkan diri kepada pengguna layanan KY, saat ini juga sudah tersedia situs web KY dalam platform Android dan iOS (KY Mobile) yang dapat diunduh di Google Play Store atau App Store.

Dengan mengunduh KY Mobile, pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan KY dalam satu platform. Selain informasi mengenai profil kelembagaan, KY Mobile juga

menyediakan akses untuk layanan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, layanan informasi publik, Jurnal KY, karakterisasi putusan, maupun produk hukum KY.

Berdasarkan hasil google analytics, untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2022 tercatat sebanyak 327.000 pengunjung (users) dan 444.000 pengunjung (sessions) yang mengakses situs web KY. Adapun persentase pengunjung yang meninggalkan halaman situs web KY adalah 74,15%. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengunjung untuk mengakses situs web KY (*session duration*) adalah 1 menit 44 detik.

4) Monitoring Media

Sepanjang 2022, Palinfo melakukan pemantauan terhadap 1.728 pemberitaan yang terdiri dari 194 berita dari www.komisiyudisial.go.id dan 1.534 berita dari media daring eksternal. Media yang paling banyak memberitakan KY adalah kompas.com (113 berita), antaranews.com (86 berita), dan detik.com (78 berita). Aktor yang paling banyak muncul dalam pemberitaan KY adalah Juru Bicara Miko Ginting dengan 439 berita. Posisi kedua yaitu Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata dengan total 181 pemberitaan. Berdasarkan topik pemberitaan, isu tentang pengawasan hakim dan pemantauan persidangan menjadi yang dominan.

Tabel 3.7

Daftar Topik Pemberitaan tentang KY Tahun 2022

No	Tugas & Wewenang KY	Jumlah
1	Advokasi Hakim	29
2	Kelembagaan KY	406
3	Pemantauan Persidangan	249
4	Pengawasan Hakim	753
5	Peningkatan Kapasitas Hakim	26
6	Peradilan	4

7	Seleksi Hakim Ad Hoc di MA	14
8	Seleksi Calon Hakim Agung	247

Dari pemantauan yang dilakukan didapatkan hasil 23 berita dengan tones negatif, 1.636 berita dengan tones netral, dan 69 berita dengan tones positif. Pemberitaan dengan tones netral didominasi oleh pengumuman kegiatan seperti pembukaan seleksi calon hakim agung dan pengumuman lain yang dirilis oleh KY. Berdasarkan total tones yang muncul tersebut, pemberitaan tentang KY di tahun 2022 ini dominan berada pada cakupan tones netral hingga positif. Merujuk kepada hasil pemantauan pemberitaan ini, dapat dikatakan bahwa kategori publisitas positif untuk pemberitaan tentang KY telah tercapai atau 100% sesuai target.

5) Penerjemahan Bahan Diseminasi Publik Komisi Yudisial

Sesuai amanat Pasal 73 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, disebutkan bahwa Bidang Data dan Layanan Informasi mempunyai salah satu fungsi penerjemahan secara tertulis dan/atau lisan. Sehubungan dengan hal tersebut salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik KY melalui media ataupun langsung adalah penerjemahan bahan diseminasi publik KY. Kegiatan penerjemahan ini utamanya dilakukan untuk artikel berita di situs web www.komisiyudisial.go.id. Pada tahun 2022, seluruh artikel berita di situs web tersebut, dengan jumlah 198 artikel, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan rincian sebagai berikut: Januari (12 berita), Februari (13 berita), Maret (9 berita), April (31 berita), Mei (6 berita), Juni (16 berita), Juli (19 berita), Agustus (10 berita), September (28 berita), Oktober (21 berita), November (24 berita), Desember (9 berita).

Kegiatan penerjemahan juga dilakukan untuk hal-hal lain. Salah satu bahan diseminasi publik KY yang rutin terbit setiap empat bulan adalah Jurnal Yudisial. Proses menyunting dan menerjemahkan baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dilakukan terhadap bagian abstrak dari jurnal tersebut yaitu sebanyak 6 naskah abstrak per jurnal. Penerjemahan juga dilakukan dalam rangka persiapan kunjungan kerja KY ke Belanda dan Belgia. Untuk kegiatan ini dilakukan penerjemahan kerangka acuan kegiatan dan surat-surat untuk kunjungan kerja tersebut. Selanjutnya, pada bulan Mei tahun 2022 salah satu media daring yang berbasis di Singapura Govinsider mewawancarai Sekretaris Jenderal KY perihal kerjasama KY dengan BIN tentang keamanan informasi. Untuk menunjang kelancaran wawancara tersebut maka dilakukan penerjemahan lisan secara konsektif saat wawancara dilakukan dan penerjemahan tertulis untuk bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan wawancara. Kegiatan lain yang dilakukan dalam tugas dan fungsi penerjemahan adalah penyusunan draft titelatur dan nomenklatur kelembagaan KY dalam bahasa Inggris. Melalui kegiatan ini diharapkan nantinya ada standarisasi pemakaian nomenklatur dan titelatur kelembagaan KY dalam bahasa Inggris.



Gambar 3.17

Tampilan Situs Web KY dengan Berita yang Diterjemahkan ke Bahasa Inggris

5. Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim

a. Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi.

Indikator pertama dari sasaran kegiatan ini adalah persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi sebesar 15%. Pengukuran dilakukan dengan menilai pemahaman peserta tentang KY melalui pretest dan posttest saat kegiatan edukasi publik dilakukan. Kegiatan edukasi publik bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sistem peradilan Indonesia dan proses hukum, memberikan pemahaman nilai-nilai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penegakan hukum sebagai upaya peningkatan acces to justice.

Sepanjang 2022, Palinfo menyelenggarakan tiga kali edukasi publik di Bukittinggi, Lampung dan Serang. Selain itu, edukasi publik juga dilaksanakan oleh Penghubung Komisi Yudisial (PKY) di sepuluh wilayah. Kegiatan edukasi publik di Bukittinggi dilakukan pada Kamis (9/7/2022) di Kantor Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Sebanyak 75 orang peserta edukasi publik ini yang terdiri atas ASN dan tokoh masyarakat, dan tokoh agama dijadikan sampel responden untuk mengukur pemahaman mereka tentang KY. Dari kegiatan di Bukittinggi ini didapatkan hasil 19,2% peserta telah memiliki pemahaman tentang KY.



Gambar 3.18

Edukasi publik di Bukittinggi, 9 Juli 2022

Selanjutnya, edukasi publik diselenggarakan di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung pada hari Kamis (25/8/2022). Sebanyak 100 orang peserta kegiatan ini yang terdiri atas ASN, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dijadikan sampel responden untuk mengukur pemahaman mereka tentang KY. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil 15,2 % peserta telah memiliki pemahaman tentang KY.



Gambar 3.19

Edukasi publik di Lampung, 25 Agustus 2022

Edukasi publik ketiga di tahun 2022 dilakukan di Kantor Wali Kota Serang pada hari Kamis (24/11/2022). Sebanyak 75 orang peserta yang terdiri atas ASN, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dijadikan sampel responden. Hasilnya, sebanyak 16,3% responden telah memiliki pemahaman tentang KY. Berdasarkan data di atas, rata-rata pemahaman publik terkait wewenang dan tugas KY dalam membangun integritas hakim adalah $(19,2\% + 15,2\% + 16,3\%) : 3 = 16,9\%$.



Gambar 3.20
Edukasi publik di Serang, 24 November 2022

Penghubung Komisi Yudisial juga melaksanakan edukasi publik di 10 wilayah, yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Tabel 3.8
Rekapitulasi Persentasi Kenaikan Pemahaman Peserta Edukasi Publik
Penghubung Komisi Yudisial

No	Penghubung	Tanggal Pelaksanaan	Narasumber	Nilai
1.	Sumatera Selatan	14 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ardi Sudrajat S.H (Praktisi Lubuklinggau) 2. Ngimadudin, S.Ag.,MH (Akademisi/ Ketua STAI Bumi Silampari) 3. M. Martindo Merta (PKY Sumsel) 4. Wiwin Prabudiani (PKY Sumsel) 5. Erlandsah (PKY Sumsel) 6. Endang Kusmadi (Ketua PWI Lubuklinggau) 	15,2%
2.	Sulawesi Selatan	25 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nur Kautsar Hasan,SH.,MH (Wakil Ketua PN Selayar) 2. Dian Ady Luhur,SH.,MH(Ketua KNPI Selayar) 3. Azwar Mahis, SH.,MH (Koordinator PKY SulSel) 	17,9%
3.	Kalimantan Barat	29 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Dr Suhadi, SH MH (Akademisi FH Univ.Tanjungpura Pontianak) - Warsipan (Kepala Desa Pinang Luar, Kabupaten Kubu Raya) 	15,8%
4.	Jawa Timur	28 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Siti Uswatun, S.H, L.LM - Fachrizal Affandi, S.Psi., S.H., M.H., Ph.D (Ketua Persada FH Univ Brawijaya) 	16,8%
5.	Riau	21 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yulianti Sembiring S.H (Penyuluh Hukum Ahli Muda Bag. Hukum Sekda Kab. Siak) 2. Hj. Desy Fefianti, S.STP. M.Msi 	15,3%

6.	Kalimantan Timur	15 September 2022	1. Ardiansyah, SH.,M.H 2. DR. Ibrahim Palino, SH.MH	16,5%
7.	Jawa Tengah	28 Oktober 2022	1. Eldi Nasali, S.H., M.H 2. Muhammad Fatkhudin, S.sy., M.HI	16,6%
8.	Maluku	19 Oktober 2022	1. Jhonson Fredy Erson Sirait S.H (Ketua Pengadilan Negeri Masohi) 2. Ali Habafi, S.H (Sekretaris Pengadilan Agama)	17,2%
9.	Nusa Tenggara Timur	4 November 2022	1. Albinus Kase, S.Sos., M.A.B (Rektor Sekolah Tinggi dan Ilmu Pendidikan Soe) 2. Cosmas Sanga, S.S (Ketua Jejaring Peduli Peradilan Bersih Timor Tengah Selatan)	17,3%
10.	Sulawesi Utara	27 Oktober 2022	1. Nova Loura Sasube, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Tondano) 2. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd. (Rektor Universitas Negeri Manado)	16,1%

Merujuk pada data di atas, rata-rata pemahaman publik terkait wewenang dan tugas KY dalam membangun integritas hakim adalah $(15,2\% + 17,9\% + 15,8\% + 16,8\% + 15,3\% + 16,5\% + 16,6\% + 17,2\% + 17,3\% + 16,1\%) : 10 = 16,47\%$. Dengan demikian rata-rata capaian peningkatan pemahaman publik terkait wewenang dan tugas KY dalam membangun integritas hakim berdasarkan edukasi publik yang dilaksanakan oleh Palinfo dan Penghubung KY adalah $(16,9 + 16,47) : 2 = 16,68\%$. Merujuk pada data ini, target indikator kinerja persentase peningkatan pemahaman publik terhadap tugas dan wewenang KY tercapai sebesar 100%.

Palinfo juga melaksanakan dialog rutin di RRI sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada publik terkait wewenang dan

tugas KY. Dialog dilakukan setiap Selasa pukul 16.00 - 17.00 WIB di RRI Pro 3 FM.

Tabel 3.9

Pelaksanaan Dialog Interaktif Komisi Yudisial di RRI Pro 3 FM Tahun 2022

Narasumber	Waktu	Tema
1. Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H. (Ketua Bidang Rekrutmen Hakim 2. Miko Ginting (Juru Bicara Komisi Yudisial)	Selasa, 13 September 2022	Membedah Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA
1. Drs. M. Taufiq HZ, M.HI (Wakil Ketua Komisi Yudisial) 2. Miko Ginting (Juru Bicara Komisi Yudisial)	Selasa, 4 Oktober 2022	Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim
1. Sukma Violetta, S.H., L.LM (Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi) 2. Miko Ginting (Juru Bicara Komisi Yudisial)	Selasa, 18 Oktober 2022	Mengupas Peran KY dalam Meningkatkan Kapasitas Hakim
1. Binziad Kadafi, S.H., L.LM., PhD	Selasa, 22 November 2022	RKUHP dalam Perspektif Tugas

(Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan) 2. Miko Ginting (Juru Bicara KY)		Advokasi Hakim KY
1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M. Ph.D	Selasa, 6 Desember 2022	Sinergisitas KY dalam Mengembalikan Kepercayaan Publik

Sebagai upaya diseminasi terhadap wewenang dan tugas KY, Palinfo menerima kunjungan dari perguruan tinggi, LSM, dan lembaga lainnya. Pada tahun 2022, Palinfo menerima 12 audiensi dari berbagai kalangan dengan jumlah total peserta adalah 803 orang.

Tabel 3.10

Daftar Pelaksanaan Audiensi Komisi Yudisial Tahun 2022

No.	Universitas	Hari/Tanggal	Jumlah Peserta	Narasumber
1	Fakultas Hukum dan Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo	Kamis/2 Juni 2022	100 orang	Totok Wintarto (Tenaga Ahli KY)
2	Hukum Online	Senin/13 Juni 2022	5 orang	Binziad Kadafi (Anggota KY)
3	Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang	Kamis/14 Juli 2022	20 orang	Miko Ginting (Juru Bicara KY)

4	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang	Jumat/29 Juli 2022	100 orang	Jonsi Afriantara (Kabid Analisis Palinfo)
5	Transperancy International Indonesia	Kamis/11 Agustus 2022	15 orang	Miko Ginting (Juru Bicara KY)
6	Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia	Kamis/8 September 2022	15 orang	Miko Ginting (Juru Bicara KY)
7	Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) RI	Selasa/20 September 2022	7 orang	Abdul Mukti (Kabid Pemeriksaan Waskim)
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Selasa/18 Oktober 2022	90 orang	Totok Wintarto (Tenaga Ahli KY)
9	SMA Insan Rabbany Tangerang Selatan	Selasa/1 November 2022	194 orang	Festy Rahma H. (Pranata Humas Ahli Muda)
10	Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Senin/14 November 2022	200 orang	Miko Ginting (Juru Bicara KY)
11	Prodi International Business Law Universitas Prasetya Mulya	Rabu/14 Desember 2022	47 orang	Juma'in (Kapus Palinfo)
12	Unit Laboratorium dan Klinik Hukum Universitas Indonesia	Jumat/16 Desember 2022	10 orang	Miko Ginting (Juru Bicara KY)

b. Laporan Pengelolaan Perpustakaan

Indikator kedua dari sasaran kegiatan ini yaitu adanya satu laporan pengelolaan perpustakaan. Target ini berhasil dipenuhi dengan adanya satu laporan pengelolaan perpustakaan sehingga capaiannya adalah 100%. Hasil ini menyamai pencapaian tahun 2021. Pengelolaan perpustakaan di tahun 2022 terdiri atas berbagai kegiatan antara lain pengelolaan koleksi, pengelolaan ruangan, dan sistem Open Public Access Catalogues (OPAC). Berikut ini ringkasan kegiatan Perpustakaan Komisi Yudisial Republik Indonesia (Perpustakaan) selama tahun 2022:

c. Jumlah Cetakan Buku dan Berbagai Bentuk Publikasi Lainnya di Bidang Yudisial

Indikator kinerja ketiga dari sasaran kegiatan kelima adalah jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial yang berjumlah 45.000 eksemplar. Indikator ini berhasil mencapai target 100% dengan adanya 45.000 eksemplar bahan publikasi di bidang yudisial dengan rincian: 3.000 eksemplar Jurnal Yudisial, 6.000 eksemplar Majalah Komisi Yudisial, 1.000 eksemplar kalender, 300 eksemplar buku Bunga Rampai, 300 eksemplar Komik Komisi Yudisial, 500 eksemplar buku agenda, 21.500 eksemplar stiker dan 12.400 eksemplar buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

▪ **Pengelolaan Aset Buku Perpustakaan**

Pengelolaan aset buku perpustakaan meliputi kegiatan inventarisasi yaitu kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara (BMN). Buku-buku BMN sebelumnya sudah terdata di aplikasi Perpustakaan secara acak dan bercampur dengan buku hibah/pemberian. Buku-buku BMN tersebut didata ulang dengan cara memisahkannya dari buku pemberian/hibah. Buku-buku BMN dicatat dan diinput ke dalam microsoft excel. Buku yang telah terdata selanjutnya diberi NUP (Nomor Urut Penerimaan) aset.

▪ **Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan**

Komisi Yudisial Republik Indonesia menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 105B/HP/XVI/05/2019 yang menyebutkan bahwa sebanyak 4.957 eksemplar buku senilai Rp 959.904.466,00 tidak memiliki pencatatan yang handal. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial selaku pengguna barang mempunyai tugas menyusun dan

menyampaikan laporan BMN serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Buku-buku Perpustakaan yang merupakan bagian dari aset BMN menjadi objek temuan dari tim auditor BPK sehingga perlu untuk dilaporkan sebagaimana aset temuan lainnya.

BPK merekomendasikan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan inventarisasi ulang atas seluruh buku di Perpustakaan yang dikategorikan sebagai BMN dengan jumlah 4.957 eksemplar. Proses re-inventarisasi BMN di Perpustakaan pada tahun anggaran 2022 dilakukan sejak bulan Januari s.d Oktober 2022. Pekerjaan ini dilakukan oleh Tim Pengelola Perpustakaan berkoordinasi dengan Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan. Jumlah buku yang ada di Sakti sebanyak 6.203 eksemplar. Berdasarkan hasil reinventarisasi BMN buku Perpustakaan, sebanyak 4.172 eksemplar telah ditemukan dan dilabeli NUP. Namun, masih terdapat 1.570 eksemplar buku yang belum dilabeli NUP.

Selain itu, Tim Pengelola Perpustakaan menemukan selisih antara jumlah data buku yang ada dengan nomor aset atau NUP sebanyak 217 eksemplar. Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan menginformasikan bahwa nomor aset tersebut telah dihapuskan.

▪ **Pengadaan Jasa Lainnya Pengelolaan OPAC Perpustakaan Komisi Yudisial**

Dalam rangka mempercepat tindak lanjut penanganan temuan audit BPK tahun 2022 mengenai aset BMN buku Perpustakaan, salah satu langkah yang dilakukan yaitu melakukan rekrutmen tenaga pengolah Open Public Access Catalogues (OPAC). Kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif antara pengelola

Perpustakaan dengan Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Biro Umum.

Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dengan rincian tahapan yaitu: seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara. Tes tertulis dan wawancara dilaksanakan secara online melalui aplikasi zoom meeting.

- **Pengelolaan Film Dokumenter / Pengembangan Koleksi Digital**

Perpustakaan Komisi Yudisial membuat video dokumenter terkait dengan kegiatan Komisi Yudisial. Video dokumenter merupakan salah satu karya digital atau pustaka rekam yang dikelola oleh Perpustakaan Komisi Yudisial. Video pendek berdurasi 3 – 10 menit digunakan sebagai media pembelajaran serta pelestarian dokumen kegiatan di lingkup Komisi Yudisial. Video dokumenter yang telah dibuat dalam format MP4 kemudian disimpan di dalam diska keras dokumenter Komisi Yudisial.

- **Pembaharuan INLIS Lite Versi 3**

Perpustakaan Komisi Yudisial menggunakan Online Public Access Catalogues (OPAC) bernama INLIS lite versi 3 sebagai sistem yang digunakan untuk otomasi dalam mengoperasikan Perpustakaan. Sebelumnya, Perpustakaan menggunakan microsoft excel dalam mendata koleksi perpustakaan. Adapun permasalahan dalam pembaharuan/updating INLIS lite versi 3 di tahun 2022 adalah akses sistem ini pada jaringan internal Komisi Yudisial.

- **Penataan Ruang Perpustakaan**

Denah Perpustakaan Komisi Yudisial mengusung konsep baru yaitu coworking space atau suatu ruangan kerja yang dapat digunakan bersama. Coworking space berdasarkan pengertian dari kamus Oxford merupakan lingkungan kerja atau kantor yang digunakan oleh orang-orang yang bekerja sendiri atau bekerja untuk perusahaan yang berbeda-beda. Secara khusus, coworking space menawarkan lingkungan kerja yang saling berbagi peralatan, ide dan pengetahuan.

▪ **Penyiangan Koleksi Buku**

Kegiatan penyiangan koleksi Perpustakaan Komisi Yudisial merupakan kegiatan untuk mendukung penataan ruang Perpustakaan. Penyiangan koleksi dilakukan pada koleksi BMN dan koleksi hibah/pemberian. Penyiangan koleksi Perpustakaan dilakukan dengan cara memilah koleksi yang akan dilayankan dengan koleksi yang masuk dalam penghapusan. Setelah koleksi dipilah, pengelola Perpustakaan menginventarisasi koleksi perpustakaan, baik yang dilayankan maupun yang masuk dalam penghapusan. Kegiatan penyiangan ini akan mengurangi penggunaan rak buku di Perpustakaan. Pengurangan rak buku ini dapat menjadikan ruangan perpustakaan menjadi lebih luas dan mengurangi beban ruang Perpustakaan terhadap Gedung Komisi Yudisial.

Koleksi Perpustakaan Komisi Yudisial tidak hanya terdiri dari koleksi BMN dan hibah/pemberian, tetapi juga terdapat koleksi karya Komisi Yudisial. Penyiangan koleksi juga dilakukan pada koleksi karya Komisi Yudisial tersebut. Kriteria koleksi karya Komisi Yudisial yang disiangi adalah koleksi yang telah usang usia informasinya. Adapun jenis koleksi yang disiangi adalah laporan penelitian putusan hakim dan kliping pers. Kedua jenis koleksi tersebut sangat tebal dan memiliki jumlah yang banyak.

Koleksi yang sudah tidak dimanfaatkan tersebut dikeluarkan dari rak koleksi. Koleksi yang dikeluarkan dari rak tersebut dikumpulkan dan disusun di suatu tempat agar terpisah dari koleksi yang lain. Koleksi tersebut selanjutnya dihapus dari koleksi Perpustakaan Komisi Yudisial.

▪ **Inventarisasi Koleksi Hibah**

Perpustakaan Komisi Yudisial memiliki ragam jenis koleksi berdasarkan sumber pengadaannya. Salah satu jenis pengadaan koleksi Perpustakaan adalah hibah/pemberian koleksi. Perpustakaan Komisi Yudisial memiliki koleksi hibah/pemberian dari pemustaka, baik internal maupun eksternal Komisi Yudisial. Koleksi hibah tersebut didata ulang berkaitan dengan kegiatan penyiangan koleksi. Pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui judul dan jumlah eksemplar koleksi hibah/pemberian. Berdasarkan hasil inventarisasi didapat hasil bahwa terdapat 856 eksemplar koleksi hibah dengan 632 judul koleksi.

▪ **Penghibahan Koleksi**

Perpustakaan Komisi Yudisial menghibahkan sebagian koleksinya kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Palembang pada hari Jumat 9 Desember 2022. Plt. Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi menyerahkan secara formal koleksi tersebut kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Koleksi yang dihibahkan sebagian besar merupakan koleksi dengan subjek hukum. Namun, terdapat juga koleksi bacaan umum seperti sosial, ekonomi, politik, agama, dan sebagainya. Jumlah koleksi yang dihibahkan ini terdiri atas 484 judul dengan 695 eksemplar buku.

▪ **Layanan Pemustaka**

Layanan pemustaka adalah layanan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada pemustaka sesuai dengan kebutuhannya secara efektif dan efisien. Salah satu bentuk layanan pemustaka adalah layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi adalah kegiatan untuk melayani pemustaka dalam peminjaman, perpanjangan, dan pengembalian buku serta penyelesaian administrasinya. Layanan sirkulasi hanya diberikan kepada pegawai Komisi Yudisial. Pemustaka dari eksternal Komisi Yudisial tidak diperkenankan meminjam koleksi Perpustakaan Komisi Yudisial. Untuk saat ini, peminjaman koleksi Perpustakaan dilakukan secara terbatas kepada pemustaka karena Perpustakaan Komisi Yudisial sedang melakukan kegiatan pendataan ulang koleksi.



Gambar 3.21

Sampul Muka Laporan Kegiatan Perpustakaan Komisi Yudisial Tahun 2022

▪ **Jumlah Cetakan Buku dan Berbagai Bentuk Publikasi Lainnya di Bidang Yudisial**

Indikator kinerja ketiga dari sasaran kegiatan kelima adalah jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial yang berjumlah 45.000 eksemplar. Indikator ini berhasil mencapai target 100% dengan adanya 45.000 eksemplar bahan publikasi di bidang yudisial dengan rincian: 3.000 eksemplar Jurnal Yudisial, 6.000 eksemplar Majalah Komisi Yudisial, 1.000 eksemplar kalender, 300 eksemplar buku Bunga Rampai, 300 eksemplar Komik Komisi Yudisial, 500 eksemplar buku agenda, 21.500 eksemplar stiker dan 12.400 eksemplar buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

6. Meningkatnya layanan perkantoran

Target dari indikator sasaran kegiatan ini adalah kategori "Puas" (range nilai 71-85%) para pengguna layanan perkantoran khususnya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk mengetahui tingkat kepuasan tersebut diukur dengan melakukan survei kepada para pengguna layanan pengelolaan TIK. Hasil yang diperoleh diharapkan menjadi masukan untuk melakukan perbaikan sehingga peran TIK untuk membantu pelaksanaan tugas KY semakin dirasakan para pengguna layanan.

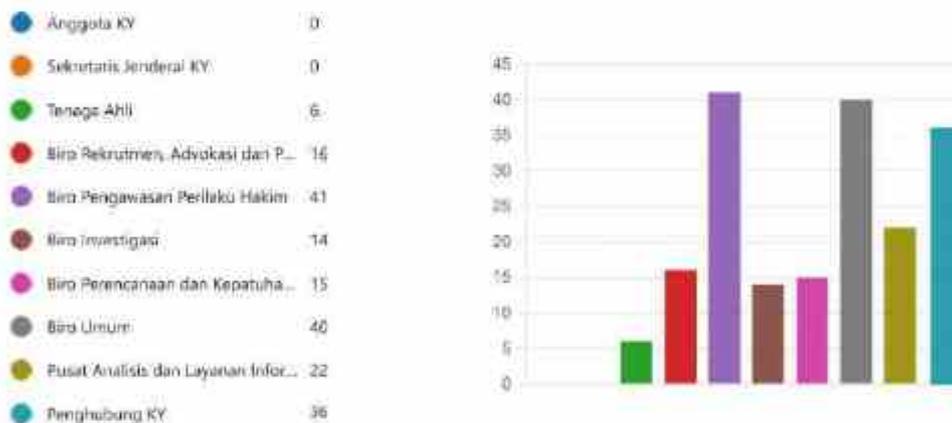
Berdasarkan Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, diketahui bahwa terdapat 9 (sembilan) ruang lingkup yang menjadi cakupan penilaian, yaitu:

1. Persyaratan;
2. Sistem Mekanisme Prosedur;

3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/ Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan;
9. Sarana Prasarana;

Hasil Survei Layanan TIK

Tingkat keyakinan survei dipastikan sebesar 99% dengan tingkat kesalahan/margin error sebesar 1%. Populasi (N) survei sebesar 280 orang dengan minimum sampel responden sejumlah 162 orang.



Gambar 3.22

Grafik Sebaran Responden Survei Pengguna Layanan Pengelolaan TIK

Hasil yang didapat dari penghitungan kuesioner secara kuantitatif didasarkan pada Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Hasil Penghitungan Kuesioner Survei Pengguna Layanan Pengelolaan TIK

UNSUR PELAYANAN	PERTANYAAN	RESPONDEN	NILAI SOAL	Σ Nilai Soal	IKM UNIT PELAYANAN		MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
				Σ Soal Terisi				
Persyaratan	P1	Responden 1 s.d Responden 187	658	3,66	3,56	667,5	A	Sangat Baik
	P2		650	3,47				
Sistem Mekanisme Prosedur	P3		0	0	3,33	623	B	Baik
	P4		0	0				
	P5		623	3,33				
Waktu Penyelesaian	P6		632	3,37	3,37	623	B	Baik
Biaya	P7		748	4	4	748	A	Sangat Baik
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	P8		623	3,33	3,33	628	B	Baik
Kompetensi Pelaksana	P9		654	3,49	3,49	654	B	Baik
Perilaku Pelaksana	P10		667	3,57	3,67	667	A	Sangat Baik
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	P11		0	0	3,27	632	B	Baik
	P12		632	3,37				
Sarana dan prasarana	P13		607	3,24	3,24	607	B	Baik
	P14		0	0				
	P15		0	0				
	P16		0	0				
	P17		0	0				
Nilai Indeks				3,47	86,95			
Kinerja Unit Pelayanan				B	BAIK/PUAS			

*) Nilai 0 karena jenis pertanyaan terbuka (esai)

Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna layanan pengelolaan TIK yang dilakukan oleh Palinfo menyatakan puas dengan layanan yang diberikan. Hal tersebut terlihat dari nilai indeks kinerja unit pelayanan pada kategori B (Baik) dengan nilai 86,95 atau bisa disamakan dengan kategori PUAS sebagaimana merujuk pada tabel

Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi tahun 2022.

Tabel 3.12

Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Kerja Sesuai Dengan Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Berpedoman pada tabel di atas, dapat dilihat nilai rata-rata hasil survei pelayanan pengelolaan TIK adalah baik, bahkan ada beberapa unsur pelayanan yang dapat nilai sangat baik yaitu unsur biaya dan unsur perilaku pelaksana. Namun, Untuk unsur sarana dan prasarana yang mendapat nilai baik harus menjadi perhatian karena mendapat nilai terendah dari sembilan unsur layanan yang ada. Hal ini menjadi catatan untuk melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap sarana dan prasarana TIK yang dikelola oleh Palinfo.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, tingkat kepuasan pengelolaan layanan TIK sudah semakin baik. Pada 2021 nilai yang didapat adalah 83,16 dengan kategori B (Baik). Tahun ini nilai yang didapat menjadi 86,95 juga dengan kategori B (Baik). Nilai yang diperoleh pada tahun 2022 juga lagi memuat kategori Kurang Baik atau C (Cukup) untuk masing-masing unsur layanan.

Dari sisi layanan yang diberikan oleh Palinfo, karena berkaitan dengan pihak ketiga (provider), masalah administrasi dan proses eskalasi ketika terjadi insiden masih menjadi persoalan yang terus dilakukan evaluasi. Hal ini sudah disampaikan Bidang Data dan Layanan Informasi kepada masing-masing penyedia saat melakukan evaluasi terhadap masing-masing vendor (provider) sebelum melakukan perpanjangan atau pembaruan kontrak.

Apabila melihat realisasi indikator kinerja Palinfo sampai dengan tahun 2022 kemudian dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Palinfo 2020-2024, dapat dinyatakan bahwa Palinfo telah mencapai target jangka menengah tersebut.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sumber daya manusia (SDM) yang ada di Palinfo hampir semuanya atau sekitar 90% telah menduduki jabatan fungsional tertentu yang memiliki kualifikasi dan profesionalitas di bidangnya. Kedua, adanya dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Selain itu, Palinfo juga didukung oleh tim pakar yang menjalankan perannya secara profesional sesuai tanggung jawab yang diberikan.

Pada tahun 2022 Palinfo mendapatkan anggaran sebesar Rp11.634.920.000. Dari jumlah tersebut anggaran yang berhasil diserap sebesar Rp11.037.757.153 atau 94,87%.

B. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

C. ANALISIS PERBANDINGAN REALISASI KINERJA LEVEL NASIONAL

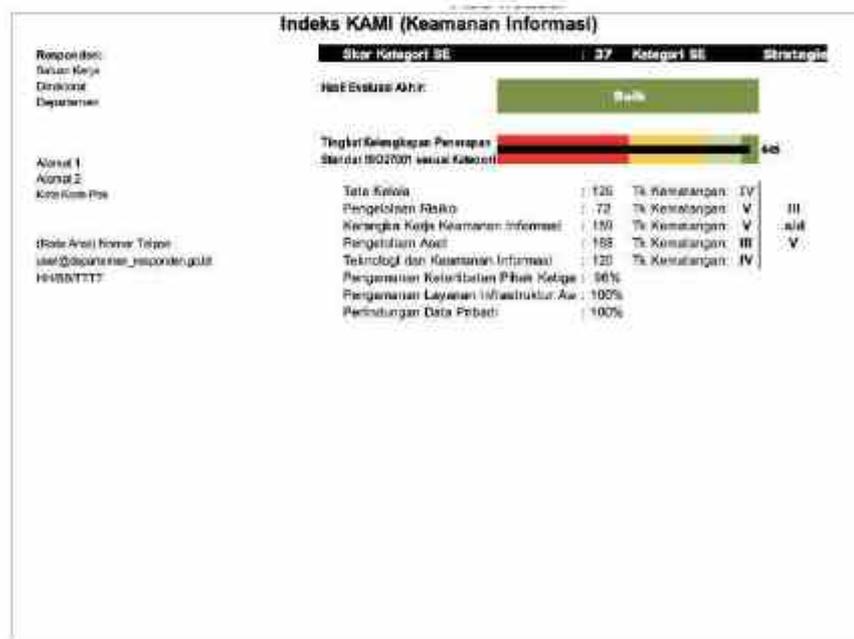
Dari target kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi, ada beberapa capaian kinerja yang merujuk kepada capaian kinerja secara nasional, diantaranya:

- a. Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif**

Sertifikasi ISO 27001:2013

ISO/IEC 27001:2013 berisi panduan keamanan informasi yang menjelaskan syarat-syarat untuk membuat, menerapkan, melaksanakan, memonitor, menganalisa, dan memelihara serta mendokumentasikan informasi agar tetap aman yang mencakup kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan atas informasi. Pada dasarnya SMKI ini menerapkan proses manajemen resiko pada keamanan informasi termasuk kepada orang, proses, dan sistem teknologi informasi.

Sejak 2017, Komisi Yudisial sudah mulai mengimplementasikan ISO/IEC 27001:2013. Secara nasional belum banyak Kementerian/Lembaga yang mengimplementasikan. Pada tahun 2022 melalui BSSN, Komisi Yudisial telah melakukan asesmen mandiri terkait Indeks KAMI yang secara best practice merujuk kepada ISO 27001:2013. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut terkait hasil penilaian mandiri tersebut.



Buatlah: Sinar dan Sains Negara

KY CSIRT

Dari bahan paparan yang disampaikan BSSN, terkait rencana pembangunan Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Komisi Yudisial dalam rencana pembangunan masuk pada tahun 2023. Namun dalam realisasinya, rekomendasi dari BSSN berdasarkan hasil asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) KY CSIRT dapat diluncurkan pada tahun 2022 (satu tahun lebih cepat dari rencana BSSN)



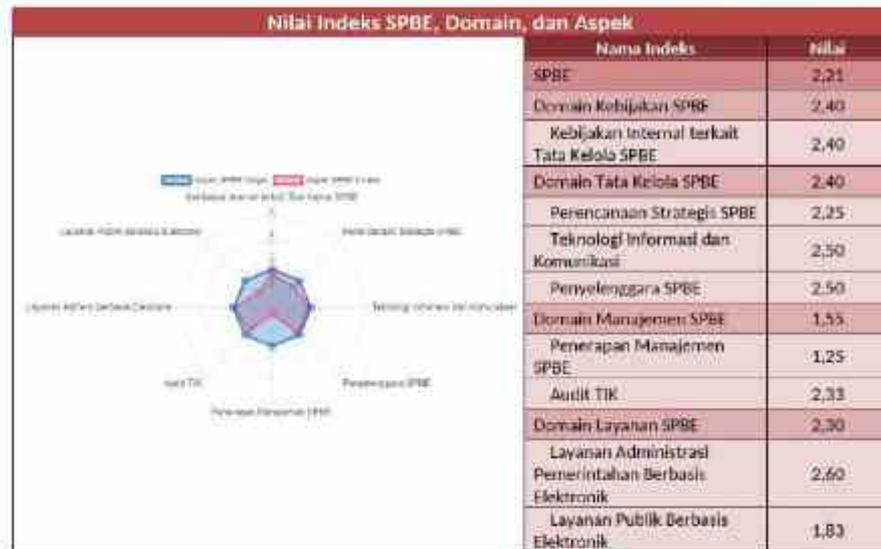
Sumber: @LIR Learning CSIRT

Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dari 47 indikator ada beberapa aspek yang berkaitan dengan ISO 27001. Berikut hasil penilaian Indeks SPBE tahun 2021.

INDEKS SPBE - KOMISI YUDISIAL

2,21
(Cukup)



Untuk tahun 2022, saat ini masih menunggu penilaian dari Kementerian PAN RB.

b. Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP)

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 09/KEP/KIP/XII/2022 tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Public Pada Badan Public Tahun 2022 memberikan predikat **“Menuju Informatif”** kepada KY untuk kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal keterbukaan informasi publik. KY memperoleh nilai 84,42.

2. Menuju Informatif

KEMENTERIAN		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1	Kementerian Pemuda dan Olahraga	80,76

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	89,38
2	Badan Informasi Geospasial	87,69
3	Badan Pemeriksa Keuangan	84,60
4	Badan Riset dan Inovasi Nasional	84,50
5	Komisi Yudisial	84,42
6	Perpustakaan Nasional	83,89
7	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	83,72
8	Majelis Permusyawaratan Rakyat	79,88

D. REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI

1. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2022 Palinfo memperoleh anggaran sebesar Rp11.634.920.000 dengan serapan sebesar Rp11.037.757.153 atau 94,87%. Rincian dari penggunaan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Rincian Penggunaan Anggaran Palinfo Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN		ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1		2	3	4
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	Rp11.634.920.000	Rp11.037.757.153	94,87

3868.EBA.963	Layanan data dan informasi	Rp6.047.430.000	Rp5.570.338.651	92,11
051	Pengelolaan infrastruktur TIK terintegrasi	Rp1.805.113.000	Rp1.698.885.085	94,12
052	Laporan hasil pemutakhiran data dan informasi	Rp928.930.000	Rp857.421.143	92,30
053	Pengelolaan sistem manajemen keamanan TIK	Rp867.832.000	Rp733.047.183	84,47
054	Pelaksanaan PPID	Rp104.306.000	Rp84.550.000	81,06
055	Media monitoring	Rp305.231.000	Rp288.743.065	94,60
056	Penyusunan bahan informasi publik	Rp933.800.000	Rp921.970.080	98,73
057	Pengelolaan perpustakaan	Rp267.170.000	Rp264.792.584	99,11
058	Edukasi publik	Rp835.048.000	Rp720.929.511	86,33
3868.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp4.033.700.000	Rp3.938.353.845	97,64
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Rp4.033.700.000	Rp3.938.353.845	97,64
3868.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp180.000.000	Rp166.411.583	92,45
051	Laporan dan evaluasi kinerja Palinfo	Rp180.000.000	Rp166.411.583	92,45
3868.FAI.001	Dokumen Hasil Kajian Kelembagaan	Rp328.209.000	Rp325.760.574	99,25
051	Pemetaan dan analisa isu/permasalahan	Rp48.180.000	Rp48.179.002	100

052A	Pelaksanaan kajian kelembagaan	Rp120.736.000	Rp120.373.073	99,70
052B	Pengelolaan administrasi fungsional Penata Kehakiman	Rp125.785.000	Rp124.312.499	98,83
052C	PENGANGKATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN	RP28.375.000	RP27.850.000	98,15
053	DISEMINASI HASIL KAJIAN	RP5.133.000	RP5.046.000	98,31
3868.FAI.002	KARAKTERISASI PUTUSAN BERBASIS APLIKASI	RP437.399.000	RP432.579.073	98,90
051	PENGUMPULAN DAN PEMETAAN PUTUSAN	RP49.350.000	RP48.747.026	98,78
052	ANALISA DAN ANOTASI PUTUSAN	RP69.805.000	RP69.404.400	99,43
053	PENGOLAHAN DAN FINALISASI KARAKTERISASI PUTUSAN	RP62.196.000	RP61.846.850	99,44
054	DISEMINASI HASIL KARAKTERISASI PUTUSAN	RP256.048.000	RP252.580.797	98,65
3868.FAI.003	ANALISIS PUTUSAN	RP608.182.000	RP604.313.427	99,36
051	PENGUMPULAN DAN PEMETAAN PUTUSAN	RP13.952.000	RP13.952.000	100
052	KONSOLIDASI DAN PELAKSANAAN ANALISIS PUTUSAN	RP452.678.000	RP449.876.952	99,38
053	DISEMINASI HASIL ANALISIS PUTUSAN	RP141.552.000	RP140.484.475	99,25

2. EFISIENSI ANGGARAN

	RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	Efisiensi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(7)=Σ(6)/Σ(3)
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik		11,634,920,000.00	11,037,757,153.00	62,83%
3868.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		10,081,130,000.00	9,508,692,496.00	
3868.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	100.00%	6,047,430,000.00	5,570,338,651.00	
3868.EBA.994	Layanan Perkantoran	100.00%	4,033,700,000.00	3,938,353,845.00	
3868.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		180,000,000.00	166,411,583.00	
3868.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100.00%	180,000,000.00	166,411,583.00	
3868.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		1,373,790,000.00	1,362,653,074.00	
3868.FAI.001	Dokumen hasil kajian Kelembagaan	100.00%	328,209,000.00	325,760,574.00	
3868.FAI.002	Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi	100.00%	437,399,000.00	432,579,073.00	
3868.FAI.003	Analisis Putusan	100.00%	608,182,000.00	604,313,427.00	

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari table di atas, berikut analisis efisiensi terhadap sasaran kegiatan penyelenggaraan pelayanan informasi kepada publik memiliki kinerja 100% dan realisasi anggarannya mencapai 94,87%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 62,83%

BAB IV

Penutup

Laporan Kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) ini merupakan uraian yang menginformasikan kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi di tahun 2022 dalam mendukung penguatan kelembagaan. Kesimpulannya adalah bahwa pada tahun 2022 Palinfo telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Penerbitan laporan akuntabilitas kinerja Palinfo ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kemunculan, perkembangan, realisasi program, dan segala hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Palinfo.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Periode 2020 s.d 2024, setiap bulannya akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Palinfo Periode 2020 s.d 2024 termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan organisasi sebagaimana dituangkan dalam visi Komisi Yudisial yaitu "Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim". Renstra Palinfo Periode 2020 s.d 2024 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di internal Palinfo sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Semua unit kerja diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Demikian laporan kinerja ini yang telah disusun dengan sebenarnya dan diharapkan dapat dipergunakan untuk evaluasi secara bersama sehingga di kemudian hari capaian kinerja akan semakin baik dan dapat didukung dengan penganggaran yang signifikan.

Lampiran



CERTIFICATE OF REGISTRATION ISO / IEC 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS

This is to certify, that:

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jalan Kramat Raya No. 57, RT.08 / RW.08, Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat 10450 – INDONESIA
Has been found to conform with the requirements of the Management System Standard mentioned above

Scope of Certification

The provision of Information Security Management Systems of Data Center, Help Desk, Application and Infrastructure Operation at Data and Information Services

This is in accordance with Statement of Applicability Document Number 12/AL2/SI.04/02/2020, Version 4.0, Released date 18th February 2020

Yessiva, S.T., M.B.A.
President Director



Cert. Number: ISMS1001009
(please click above for certificate validity)



(scan me)

Initial Certification Date : 02 February 2018
Issue Date : 01 February 2021
Expired Date : 31 January 2024

This certificate is issued according to the special Certificate Registration of certification services that can be accessed at www.cbga.com and www.iso.org. This certificate's validity is subject to the continuous satisfactory performance of the Organization's Management System. Certificate could be withdrawn by following the rule provided above (on the left-hand side) or by scanning the code provided above (on the right-hand side) with a smart phone.
Office Address: South Quarter Tower A, 18th Floor Unit D18.2, R.A. Kartini Kcs 3, Cikarang Barat, Cikarang, Jakarta Selatan 12500